

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II  
KPP PRATAMA GRESIK**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastyastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik dalam mendukung tercapainya tujuan strategis Direktorat Jenderal Pajak. Dalam laporan ini, disampaikan berbagai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan selama periode pelaporan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal ini tidak lepas dari kerja sama, dukungan, dan komitmen seluruh pihak, termasuk pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik, wajib pajak, serta instansi terkait lainnya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi yang telah diberikan.

Kami juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi referensi bagi peningkatan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga upaya yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, khususnya dalam mendukung pembangunan nasional melalui penerimaan pajak yang optimal.

*Salam Sehat,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Om santi santi om.*

Gresik, 29 Januari 2025  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Harianto Tarigan



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja adalah konsep yang merujuk pada kewajiban suatu organisasi, lembaga, atau individu untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil dari tugas, wewenang, dan sumber daya yang telah diberikan. Dalam konteks organisasi publik atau pemerintahan, akuntabilitas kinerja berfokus pada pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan mandat, target, dan standar yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyajikan ikhtisar capaian kinerja tahun 2024.

KPP Pratama Gresik adalah salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah tanggung jawab Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. KPP Pratama Gresik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, penegakan hukum, dan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Tahun 2024 disusun untuk dapat digunakan sebagai alat acuan serta pengukuran kinerja secara kuantitatif. Laporan Kinerja merupakan bentuk nyata atas pelaksanaan tugas dan berfungsi sebagai alat kontrol untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan KPP Pratama Gresik dalam upaya mencapai tujuan utama di tahun 2024 yaitu mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 3,155,472,249,000.

Sebagai salah satu bagian integral dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional melalui optimalisasi penerimaan pajak. Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Gresik memiliki visi dan misi sebagai berikut:

### 1. Visi KPP Pratama Gresik

Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan.

## 2. Misi KPP Pratama Gresik

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil dengan didukung oleh aparatur pajak yang berintegritas, profesional dan bermotivasi.

KPP Pratama Gresik mengadopsi pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai kerangka pikir untuk menyelaraskan perencanaan strategis dengan implementasi strategi. BSC berfungsi sebagai alat manajemen strategis yang mengubah Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi menjadi langkah-langkah operasional yang terstruktur. Pengukuran kinerja berbasis BSC dilakukan melalui penilaian yang mengacu pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK).

Data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Pratama Gresik Tahun 2024 secara rinci disajikan pada gambar di bawah ini.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	101,96
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,96
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,04%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,59	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,59
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,53
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,42
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,98%	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,98
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,64
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,64%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,64
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	115,68
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,65
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,29%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,29
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	109,91%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,15
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	112,11%	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,11
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,70%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,70
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	116,66%	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,66
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	116,20%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							106,62
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	55,13%	Max	P/L	19,00%	57,58%	100,24
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	116,83
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,65
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,28	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,27
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,21	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,24
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	99,84	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,83

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 09:41:08 WIB

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KPP PRATAMA GRESIK</b> .....	2
<b>C. SISTEMATIKA LAPORAN</b> .....	4
<b>BAB II</b> .....	6
<b>A. PERENCANAAN STRATEGIS</b> .....	6
<b>B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</b> .....	9
<b>BAB III</b> .....	13
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	13
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b> .....	132
<b>C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA</b> .....	133
<b>D. KINERJA LAIN-LAIN</b> .....	134
<b>BAB IV</b> .....	135

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah instansi pemerintah setingkat Eselon I yang berada di bawah Kementerian Keuangan, dengan tugas utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkup pengelolaan bidang pajak yang berada di bawah DJP mencakup administrasi pajak pusat, yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PBB (selain sektor perkotaan dan pedesaan), serta Bea Materai.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Tugas pokok KPP Pratama Gresik adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pajak Tidak Langsung lainnya di wilayah kerja yang mencakup 18 kecamatan di Kabupaten Gresik. Dalam menjalankan tugas tersebut, KPP Pratama Gresik memiliki beberapa fungsi, antara lain pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perpajakan, baik bagi instansi itu sendiri maupun bagi pemerintah dan masyarakat. Laporan kinerja ini merupakan alat evaluasi yang memungkinkan manajemen KPP untuk menilai sejauh mana pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau penguatan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Gresik mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KPP PRATAMA GRESIK**

### **1. KEDUDUKAN**

KPP Pratama Gresik adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II.

### **2. TUGAS**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **3. FUNGSI**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan;
- c. penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan;
- d. edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan penghapusan/pencabutan Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, atau objek pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk kepentingan perpajakan;
- g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan;
- h. pemutakhiran basis data perpajakan;
- i. pengenaan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Permukaan Bumi Onshore,

Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya;

- j. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

#### 4. STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA GRESIK

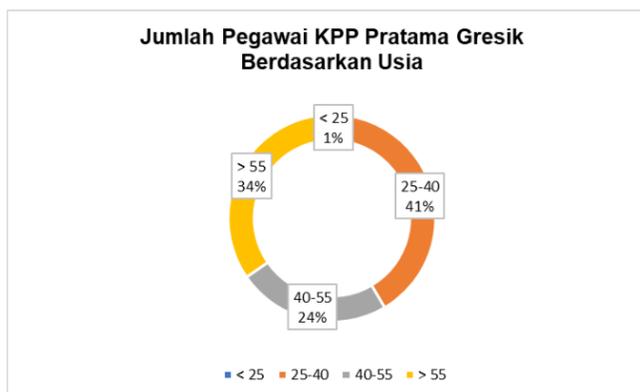
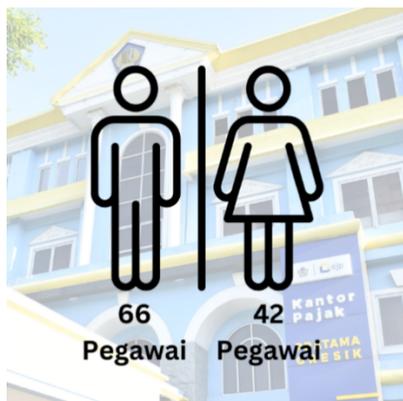
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.



## 5. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA KPP PRATAMA GRESIK

KPP Pratama Gresik 109 orang pegawai dengan rincian 66 pegawai pria, dan 42 pegawai wanita yang memiliki tingkat usia, jenis kelamin, pendidikan, golongan/jabatan beragam mulai dari usia dibawah 25 tahun hingga diatas 55 tahun, mulai jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) hingga jenjang S2 (pascasarjana), mulai golongan II hingga golongan IV.



## C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penulisan laporan kinerja ini akan mengikuti struktur yang terorganisir untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari laporan kinerja ini. Berikut adalah sistematika penulisan yang diusulkan:

### **BAGIAN AWAL**

Bagian awal laporan kinerja terdiri atas halaman sampul depan, halaman kata pengantar, halaman ringkasan eksekutif, halaman daftar isi.

### **BAGIAN INTI**

Bagian inti laporan kinerja memuat hal-hal sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain latar belakang; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sistematika laporan.

#### **BAB II: PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis, dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024.

#### **BAB III: Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN, efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024, kinerja lain-lain, dan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN**

Berisi perjanjian kinerja tahun 2024 dan hal-hal lain yang dianggap perlu dilampirkan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) adalah sebuah dokumen perencanaan suatu organisasi atau instansi yang berisi tujuan jangka panjang dan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra DJP Tahun 2020-2024 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, struktur kelembagaan, serta target kinerja dan pendanaan DJP untuk periode tersebut. Penyusunan Renstra DJP 2020-2024 didasarkan pada berbagai dokumen perencanaan tingkat Kementerian Keuangan dan Nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Salah satu agenda pembangunan yang relevan dengan DJP adalah Agenda “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.” Dalam Renstra Kemenkeu, dukungan DJP mencakup:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Optimalisasi penerimaan negara.
3. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lincah, efektif, dan efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profil DJP.
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
4. Arah Kebijakan DJP.
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah: “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola

Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

#### Misi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, misi DJP adalah:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020).

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan, disusunlah tujuan, sasaran strategis, serta target kinerja. Di KPP Pratama Gresik, penetapan tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja dituangkan dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* KPP Pratama Gresik. Penetapan kinerja KPP Pratama Gresik didasarkan pada Peta Strategi Kemenkeu-*Three* KPP Pratama Lamongan, yang merupakan turunan dari Peta Strategi Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Sasaran strategis yang tercantum dalam peta strategi ini kemudian dijabarkan menjadi IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk mempermudah perumusan program dan kegiatan yang lebih spesifik.

Untuk memastikan pencapaiannya, kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPP Pratama Gresik ditandatangani oleh Kepala Kantor dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah. Kontrak kinerja ini kemudian dilanjutkan ke tingkat eselon IV di bawahnya untuk menjamin seluruh IKU dapat mencapai target yang telah ditentukan. Berikut ini adalah tabel sasaran strategis dan target kinerja KPP Pratama Gresik untuk tahun 2024:

## SASARAN STRATEGIS (SS) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	*)
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	*)
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

\*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/P/P/01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Rencana Kerja dan Anggaran KPP Pratama Gresik pada pagu alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp 5.976.529.000,00.

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
410311	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK			5.976.529.000	
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara			1.227.622.000	
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara			431.885.000	
4791.BMA	Data dan Informasi Publik [Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR	6.653 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi		431.885.000	
4791.BMA.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	5.895 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi		114.599.000	
4791.BMA.005	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	758 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi		317.286.000	
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi			404.338.000	
4792.BMB	Komunikasi Publik [Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR	48 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume		404.338.000	
4792.BMB.003	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	2 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume		152.230.000	
4792.BMB.005	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	46 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume		252.108.000	
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum			391.399.000	
4794.BCE	Penanganan Perkara [Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR	3.092 Perkara, Berkas Perkara		186.323.000	
4794.BCE.001	Dokumen Penagihan Aktif	3.092 Perkara, Berkas Perkara		186.323.000	

Kemudian, sehubungan dengan adanya Revisi Anggaran tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada tanggal 17 September 2024 ditetapkan pagu sebesar Rp 6.019.009.000,00. Penambahan digunakan untuk mengakomodir kebutuhan biaya penambahan belanja modal sebesar Rp 128.010.000,00 untuk pengadaan *Scanner*, LCD Proyektor, *Printer* Kartu NPWP, Kursi Rapat, Meja Lipat Besar, Meja Lipat Kecil, Kursi Eselon IV dan Supervisor, serta Meja Rapat.

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah	SD/CP
4794.BCE	Penanganan Perkara [Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR	3.092 Perkara, Berkas Perkara		186.323.000	
4794.BCE.001	Dokumen Penagihan Aktif	3.092 Perkara, Berkas Perkara		186.323.000	
4794.BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan [Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR	535 Laporan		205.076.000	
4794.BIG.003	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	310 Laporan		23.625.000	
4794.BIG.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	215 Laporan		161.326.000	
4794.BIG.005	Laporan Penilaian	10 Laporan		20.125.000	
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen			4.748.907.000	
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			3.924.755.000	
4707.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR	24 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3.924.755.000	
4707.EBA.001	Kerumah tanggaaan	12 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		103.442.000	
4707.EBA.994	Layanan Perkantoran	12 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3.821.313.000	
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM			824.152.000	
4708.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] Lokasi : JAWA TIMUR	12 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		824.152.000	
4708.EBA.994	Layanan Perkantoran	12 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		824.152.000	

Selanjutnya, revisi ke-8 yang disahkan pada 4 November 2024 menambahkan anggaran untuk belanja pegawai berupa uang makan, sehingga total DIPA menjadi Rp 6.124.261.000,00. Kemudian, pada 12 November 2024, disahkan revisi atas blokir SPD sesuai dengan instruksi presiden sebesar Rp 21.348.000,00, yang setara dengan 0,35% dari total pagu anggaran. Sebagai hasil dari perubahan-perubahan tersebut, total pagu akhir KPP Pratama Gresik per 31 Desember 2024 adalah Rp 6.124.261.000,00.

## B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Proses penyusunan PK pada UPK—*One* hingga UPK—*Three* dilakukan melalui refinement berdasarkan hasil review PK tahun sebelumnya dengan mengacu pada PK unit organisasi pada level di atasnya serta rencana strategis UPK tersebut. Proses

penjabaran dan penyelarasan PK meliputi SS dan IKU dilakukan melalui proses *cascading* dan *alignment*.

Proses penyusunan perjanjian kinerja KPP Pratama Gresik Tahun 2024 dilakukan sebagai bagian dari implementasi sistem manajemen kinerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan ini dimulai dengan memahami arah kebijakan strategis Kementerian Keuangan yang tercermin dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, yang menjadi acuan bagi KPP Pratama Gresik sebagai unit pelaksana teknis.

#### Proses Penyusunan Perjanjian Kinerja

##### 1. Penetapan Arah Strategis

Penyusunan dimulai dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan strategis, seperti Renstra Kemenkeu 2020-2024, Peta Strategi Kemenkeu-Two, dan sasaran pembangunan yang selaras dengan RPJMN 2020-2024. Dari dokumen-dokumen tersebut, ditentukan sasaran strategis yang akan menjadi fokus kinerja KPP Pratama Gresik.

##### 2. Identifikasi Sasaran Strategis dan IKU

Berdasarkan Peta Strategi Kemenkeu-Three, KPP Pratama Gresik menjabarkan sasaran strategis yang relevan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini dirancang untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan secara kuantitatif dan objektif.

##### 3. Perumusan Rincian Target Kinerja dan Inisiatif Strategis

Dalam tahap ini, target kinerja dijabarkan secara rinci berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, sehingga setiap target bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Selanjutnya, inisiatif strategis dirancang sebagai langkah konkret untuk mendukung pencapaian target tersebut.

##### 4. Penandatanganan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja disahkan melalui penandatanganan oleh Kepala KPP Pratama Gresik, disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Penandatanganan ini menjadi komitmen formal dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama Gresik tanggal 31 Januari 2024. Pada tanggal 2 September 2024 disepakati addendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-09A/WPJ.24/2024 serta Sasaran Kinerja Pegawai Kepala KPP Pratama Gresik dengan perubahan target dan *trajectory* pada Indikator Kinerja utama 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit.

## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-09A/WPJ.24/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-09/WPJ.24/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 skala (100)	85 skala (100)	-	-	-	85 skala (100)	85 skala (100)	85 skala (100)	85 skala (100)

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II,

Gresik, 2 September 2024  
Kepala KPP Pratama Gresik,

## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1.	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 skala (100)	85 skala (100)	-	-	-	85 skala (100)	85 skala (100)	85 skala (100)	85 skala (100)

Pegawai yang Dinilai,

Gresik, 2 September 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Gresik, penting untuk memastikan bahwa dokumen tersebut telah mengakomodir amanat yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (Renstra DJP) Tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa poin kunci berikut:

### 1. Keterpaduan dengan Tujuan Strategis DJP

Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat tujuan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, optimalisasi penerimaan negara, dan efisiensi administrasi perpajakan. Perjanjian kinerja Kepala KPP Pratama Gresik harus mencerminkan upaya pencapaian tujuan ini melalui indikator kinerja utama (IKU) yang relevan.

### 2. Pencapaian Target Nasional

Dalam Renstra DJP, terdapat target-target penerimaan pajak yang menjadi bagian dari kontribusi DJP terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perjanjian kinerja Kepala KPP Pratama Gresik harus disusun dengan mengacu pada target penerimaan dan tingkat kepatuhan formal maupun material di wilayah kerjanya.

3. Penyelarasan dengan Nilai-Nilai Kemenkeu dan DJP

Renstra DJP juga menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan (IPSTK). Perjanjian kinerja harus mencantumkan aspek penguatan budaya kerja yang mendukung nilai-nilai ini.

4. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Salah satu amanat penting dari Renstra DJP adalah penguatan tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja. Perjanjian kinerja harus menunjukkan komitmen Kepala KPP Pratama Gresik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

Dengan mengakomodir amanat dalam Renstra DJP Tahun 2020-2024, perjanjian kinerja Kepala KPP Pratama Gresik menjadi dokumen yang selaras dengan tujuan dan strategi nasional DJP, memuat indikator kinerja yang relevan dan terukur, dan berfokus pada hasil (*outcome*) yang memberikan dampak nyata terhadap penerimaan negara dan pelayanan kepada wajib pajak.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Tahapan penghitungan NKO dimulai dengan identifikasi *raw data*, menghitung realisasi IKU, indeks capaian IKU, nilai sasaran strategis, nilai perspektif, hingga mendapatkan NKO

*Raw data* atau data mentah realisasi merupakan sekumpulan data mentah perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU. Sedangkan Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan *raw data* berdasarkan formula dalam manual IKU.

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi.

Secara keseluruhan, NKO KPP Pratama Gresik pada tahun 2024 mencapai angka 108,83% meskipun sedikit turun dari realisasi NKO tahun 2023 yaitu sebesar 111,79%, namun status dari keseluruhan IKU yang berjumlah 20 tersebut adalah berwarna hijau. Nilai NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing tertimbang yaitu *SS Stakeholder Perspective* (101,96) dengan bobot tertimbang 30%, *SS Customers Perspective* (100,53) bobot tertimbang 20%, *Internal Process Perspective* (115,68) bobot tertimbang 25%, dan *Learning and Growth Perspective* (116,83) bobot tertimbang 25%. Adapun secara rinci data realisasi dan capaian target IKU KPP Pratama Lamongan Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut:

**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II**  
**KPP KPP PRATAMA GRESIK**  
**PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	101,96
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,96
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,04%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,59	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,59
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,53
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,42
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,98%	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,98
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,64
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,64%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,64
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	115,58
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,65
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,29%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,29
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	109,91%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,15
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	112,11%	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,11
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,70%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,70
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	116,66%	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,66
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	116,20%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							108,62
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	55,13%	Max	P/L	19,00%	57,58%	100,24
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	116,83
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,65
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,28	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,27
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,21	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,24
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	99,84	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,83

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 09:41:08 WIB

Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Tahun 2024 dijelaskan sebagaimana berikut ini:

### 1. Persentase realisasi penerimaan pajak (1a-CP)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sem 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	24%	47%	47%	75%	75%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	27.00%	47.42%	47.42%	63.45%	63.45%	100.04%	100.04%
<b>Capaian</b>	112.50%	100.89%	100.89%	84.60%	84.60%	100.04%	100.04%

1) Deskripsi Sasaran Strategis:

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

2) Definisi IKU:

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

### 3) Formula IKU:

<b>Formula:</b>
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$

### 4) Realisasi IKU:

#### Kinerja Penerimaan

TAHUN  BULAN  SAMPAI  UNIT  URUT  Perhitungan

[DOWNLOAD PENYESUAIAN PERTUMBUHAN](#)

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN		
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO	
1	PRATAMA SIDOARJO UTARA	2,197,619,387,000	1,925,914,316,504	0	334,747,578,105	-43,217,573,995	25,722,700,774	2,243,167,021,388	32,921,344,249	2,210,245,677,139	1,645,967,882,157	1,620,612,709,622	100.57	36.28	36.38	
2	PRATAMA PAMEKASAN	527,449,380,000	492,775,402,837	0	40,851,622,668	-3,746,672,776	4,111,491,013	533,991,843,742	3,559,305,920	530,432,537,822	413,754,067,418	411,889,205,824	100.57	29.06	28.78	
3	PRATAMA MADIUN	698,778,591,000	692,075,229,611	0	36,712,893,559	-5,073,288,363	4,783,245,368	728,498,080,175	27,056,359,179	701,441,720,996	579,263,823,303	568,651,244,403	100.38	25.76	23.35	
4	PRATAMA LAMONGAN	363,985,439,000	364,731,046,280	0	14,560,819,133	-3,685,029,972	4,250,951,313	379,857,786,754	14,972,557,262	364,885,229,492	304,614,033,790	287,909,235,708	100.25	24.7	26.74	
5	PRATAMA BOJONEGORO	881,209,859,000	901,624,885,064	0	11,679,497,155	-7,471,136,927	7,908,467,616	913,741,712,908	30,602,691,272	883,139,021,636	763,100,366,294	738,106,353,051	100.22	19.74	19.65	
6	PRATAMA JOMBANG	545,951,320,000	554,594,203,522	0	17,258,448,944	-6,402,778,393	5,789,260,324	571,239,134,397	24,154,680,254	547,084,454,143	494,601,331,435	466,792,075,725	100.21	15.49	17.2	
7	PRATAMA SIDOARJO BARAT	885,176,391,000	891,588,119,725	0	28,211,062,864	-10,388,521,100	7,557,209,980	916,967,871,469	29,970,648,950	886,997,222,519	790,863,270,229	774,053,134,915	100.21	15.95	14.59	
8	PRATAMA SIDOARJO SELATAN	1,132,826,253,000	1,167,107,201,450	0	17,319,743,021	-20,597,163,406	20,548,236,162	1,184,378,017,227	49,134,830,802	1,135,243,186,425	966,960,802,354	945,693,273,330	100.21	22.48	20.04	
9	PRATAMA MOJOKERTO	945,606,818,000	960,666,269,807	0	17,940,501,316	-15,934,353,732	11,603,366,628	974,275,784,019	26,886,842,516	947,388,941,503	867,616,525,294	853,961,611,858	100.19	12.29	10.94	
10	PRATAMA NGAWI	491,318,586,000	476,558,598,773	0	30,945,765,695	-5,206,342,178	4,488,135,316	506,796,157,606	15,017,746,295	491,778,411,311	451,843,230,220	439,880,206,517	100.09	12.16	11.8	
11	PRATAMA PONOROGO	423,106,911,000	399,382,318,514	0	28,886,016,359	-4,940,298,657	3,889,839,887	427,217,876,103	3,880,280,956	423,337,595,147	387,331,897,318	382,144,493,649	100.05	10.3	10.78	
12	MADYA GRESIK	7,942,245,550,000	10,033,286,737,356	103,827,394,010	52,192,703,145	-65,430,896,608	66,298,117,037	10,190,174,054,940	2,244,101,581,127	7,946,072,473,813	9,703,348,101,918	7,473,330,431,570	100.05	5.02	6.33	
13	PRATAMA TUBAN	592,129,226,000	586,335,807,766	0	12,468,933,363	-2,737,953,138	5,800,382,809	601,867,170,800	9,443,030,259	592,424,140,541	550,565,635,833	546,792,192,482	100.05	9.32	8.35	
14	PRATAMA GRESIK	3,155,472,249,000	3,342,413,150,673	0	18,802,535,825	-38,710,639,390	37,615,842,294	3,360,120,889,902	209,231,454,082	3,156,889,435,820	3,291,028,175,274	3,122,115,387,898	100.04	2.1	1.11	
15	PRATAMA BANGKALAN	335,694,904,000	303,963,940,749	0	41,182,031,069	-1,951,130,838	3,525,493,248	346,720,334,208	12,895,046,920	333,825,287,288	321,349,497,971	318,785,243,024	100.04	7.9	4.72	
16	MADYA SIDOARJO	10,410,471,188,000	12,075,301,551,607	37,486,212,439	37,735,938,009	-96,498,860,365	99,389,308,332	12,153,414,150,022	1,738,947,405,298	10,414,466,744,724	11,094,389,293,754	9,487,508,106,190	100.04	9.55	9.77	
17	PRATAMA GRESIK UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	<b>Jumlah</b>	31,527,042,052,000	35,168,318,780,238	141,313,606,449	741,496,090,230	-331,993,339,858	313,292,748,601	36,032,427,885,660	4,466,775,805,341	31,565,652,080,319	32,626,597,934,562	28,438,225,105,766	100.12	10.44	11.00	

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik mencapai Rp 3.156.889.435.820,-, yang setara dengan 100,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.155.472.249.000,-. Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 adalah 100,04%.

#### b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kinerja penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik menunjukkan tren yang cukup dinamis. Pada tahun 2021, capaian penerimaan berada di angka 88,14%, yang menunjukkan bahwa target penerimaan belum tercapai secara optimal. Namun, pada tahun 2022, terdapat lonjakan kinerja yang signifikan, dengan capaian sebesar 118,30%, melampaui target yang ditetapkan. Tahun 2023 mencatat kinerja yang juga baik, dengan realisasi penerimaan mencapai 106,66%, yang kembali melampaui target. Memasuki tahun 2024, capaian penerimaan pajak tercatat sebesar 100,04%, yang menunjukkan bahwa target tahun tersebut berhasil.

dicapai secara akurat, meskipun tidak ada kelebihan penerimaan yang mencolok seperti pada tahun 2022 dan 2023.

Dibandingkan dengan tahun 2024, kinerja penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Tahun 2022 merupakan puncak capaian tertinggi dengan penerimaan yang jauh melampaui target. Sementara itu, tahun 2024 mencerminkan konsistensi dan stabilitas dalam pencapaian target penerimaan dengan persentase yang tepat sasaran. Hal ini menunjukkan peningkatan akurasi dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi penerimaan pajak oleh KPP Pratama Gresik.

- c. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik melakukan berbagai upaya *extra effort* yang terukur dan strategis. Beberapa langkah signifikan yang diambil meliputi:

1) **Pendekatan Proaktif terhadap Wajib Pajak**

KPP Pratama Gresik secara aktif menjalin komunikasi dengan para wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, melalui sosialisasi kebijakan pajak terkini, edukasi intensif, serta diskusi terkait kewajiban perpajakan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan formal maupun material para wajib pajak.

2) **Optimalisasi Pengawasan dan Pemantauan**

Pengawasan secara menyeluruh dilakukan dengan memanfaatkan data berbasis teknologi informasi. Melalui integrasi data, KPP dapat mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergali, mengawasi pelaporan pajak, melakukan pemetaan sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas penerimaan, meningkatkan kegiatan pengawasan melalui SP2DK, konseling, dan STP, melakukan kegiatan penilaian atas objek pajak yang telah diusulkan oleh Seksi Pengawasan dan FPP, melakukan pengamatan dalam rangka penggalan potensi sektor mandatory dan pilihan KPP, pengukuhan PKP Jabatan WP pedagang emas, melaksanakan kegiatan lelang serentak, serta melaksanakan edukasi ke bendahara desa.

3) **Pelaksanaan Pemeriksaan yang Tepat Sasaran**

Pemeriksaan pajak difokuskan pada wajib pajak dengan risiko kepatuhan rendah atau potensi pajak yang signifikan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk

meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga memberikan efek jera terhadap praktik penghindaran pajak.

4) **Pemanfaatan Teknologi Digital**

Dalam mendukung efektivitas pelayanan dan pengawasan, KPP Pratama Gresik mengoptimalkan penggunaan aplikasi seperti e-filing, e-billing, dan e-form. Selain itu, pemanfaatan big data membantu dalam analisis potensi pajak serta peningkatan efisiensi operasional.

5) **Pendekatan Persuasif melalui Kegiatan Business Development Services (BDS)**

KPP secara aktif memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama UMKM, untuk memahami kewajiban perpajakan mereka. Melalui langkah ini, tidak hanya penerimaan pajak yang meningkat, tetapi juga kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

6) **Sinergi dan Kolaborasi**

KPP Pratama Gresik menjalin kerja sama dengan instansi lain, seperti pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha, untuk memperluas basis pajak. Kolaborasi ini membantu menjangkau sektor-sektor yang sebelumnya sulit teridentifikasi serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga melakukan kolaborasi dengan PPNS Kanwil.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam melakukan analisis terhadap keberhasilan maupun kegagalan kinerja penerimaan pajak, KPP Pratama Gresik mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi capaian serta melakukan langkah-langkah perbaikan strategis. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan antara target kuantitas dan kualitas. Ketika target kualitas, seperti pengelolaan wajib pajak strategis, sulit dicapai, *Account Representative* (AR) sering kali lebih berfokus pada pencapaian target kuantitas, sehingga berdampak pada hasil yang kurang optimal dalam beberapa aspek.

Selain itu, materi wajib pajak berkualitas yang dapat dikelola oleh AR terbatas. Hal ini menyebabkan potensi pajak yang dapat dimaksimalkan menjadi kurang optimal. Rendahnya *success rate* data pemicu serta *ability to pay* dari wajib pajak juga menjadi tantangan signifikan yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak. KPP Pratama Gresik terus berupaya meningkatkan kinerja penerimaan pajak

secara berkelanjutan, menghadapi tantangan yang ada, serta memastikan kontribusi maksimal bagi penerimaan negara.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, KPP Pratama Gresik telah melakukan berbagai langkah optimalisasi. Salah satu fokus utama adalah mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target penerimaan pajak tahun 2024. KPP juga memanfaatkan secara maksimal sumber data yang tersedia melalui Sistem Informasi DJP (SIDJP), Approweb, dan Mandor untuk meningkatkan akurasi pengawasan, pemetaan potensi, dan efektivitas pengelolaan wajib pajak.

Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya membantu menghemat waktu dan tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas administrasi perpajakan. Dengan strategi ini, KPP Pratama Gresik mampu mengelola sumber daya secara optimal untuk mendukung kinerja yang lebih baik dan mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Dalam menganalisis program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, KPP Pratama Gresik secara aktif melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mendukung pencapaian target. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap setiap program dan kegiatan memungkinkan identifikasi masalah atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Hal ini memungkinkan perbaikan dan penyesuaian strategi secara cepat, sehingga dapat memaksimalkan kinerja dan pencapaian target penerimaan pajak. Koordinasi yang efektif dengan Kantor Wilayah menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pernyataan kinerja yang telah ditetapkan.

g. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;

KPP Pratama Gresik secara rutin melakukan evaluasi setiap triwulan untuk menilai pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun guna mencapai target

kinerja. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi risiko yang diidentifikasi dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap pencapaian kinerja penerimaan pajak. Dengan melakukan pemantauan secara berkala, KPP dapat segera mengidentifikasi potensi risiko yang muncul dan melakukan penyesuaian strategi yang diperlukan. Pendekatan ini membantu meminimalkan gangguan yang dapat menghambat pencapaian target, sehingga rencana aksi dapat berjalan dengan optimal dan hasilnya tercapai sesuai harapan.

- h. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat;

KPP Pratama Gresik memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dalam pencapaian Persentase Realisasi Penerimaan Pajak, dengan fokus pada akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi semua wajib pajak. KPP mengelola data terpilah untuk memastikan bahwa pengguna layanan, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau berasal dari kelompok yang terpinggirkan, dapat mengakses layanan pajak dengan mudah. Selain itu, KPP memastikan kontrol dan partisipasi yang setara dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Dengan memperhatikan prinsip inklusivitas ini, KPP Pratama Gresik berupaya agar penerimaan pajak yang dicapai tidak hanya mencerminkan keberhasilan dari segi kuantitas, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari penerimaan pajak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini berdampak positif pada pencapaian target penerimaan yang lebih merata dan adil, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan yang inklusif.

- i. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll;

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Gresik memberikan kontribusi langsung terhadap upaya pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan pembangunan, termasuk dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan isu sosial lainnya.

Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan alokasi dana yang cukup untuk program-program pemerintah yang mendukung tujuan-tujuan tersebut.

KPP Pratama Gresik, dengan pencapaian penerimaan yang akurat, membantu memperkuat pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk inisiatif yang berfokus pada penurunan emisi karbon, perbaikan gizi, peningkatan kualitas kesehatan, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan. Selain itu, pendapatan negara yang lebih stabil juga memungkinkan pemerataan pembangunan, sehingga kemiskinan ekstrem dapat ditekan dan akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk kesehatan dan pendidikan, dapat diperluas. Dengan demikian, pencapaian IKU pada KPP Pratama Gresik tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

j. Rencana aksi ke depan

Rencana aksi ke depan KPP Pratama Gresik menunjukkan langkah yang sangat komprehensif dalam menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak. Salah satu langkah utama adalah menetapkan Daftar Prioritas Pengawasan untuk tahun 2024, agar kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) lebih terarah dan fokus. Meskipun demikian, Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tetap menjadi bagian penting yang tidak akan diabaikan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Selain itu, untuk menyelaraskan program dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, KPP Pratama Gresik akan Fokus pada prioritas pengawasan dan pemanfaatan potensi sektoral yang lebih mendalam, hal ini adalah pendekatan yang sangat strategis. Dengan memperhatikan sektor-sektor kunci seperti industri pupuk, kayu, perdagangan, barang logam, dan jasa rumah sakit, KPP Pratama Gresik tidak hanya memaksimalkan penerimaan dari sektor yang sudah mapan, tetapi juga menggali potensi pajak baru yang mungkin selama ini kurang terdeteksi.

Dalam rangka mendukung pencapaian ini, beberapa langkah konkret akan dilaksanakan, antara lain:

- 1) Melaksanakan penelitian dan analisa data internal dan eksternal terhadap wajib pajak (WP), termasuk CRM IRE dan bedah WP secara kualitas dan kuantitas.

- 2) Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui imbauan, SP2DK, konseling, STP, serta kolaborasi dengan PPNS Kanwil.
- 3) Menindaklanjuti data pembayaran WP yang memiliki *shortfall* dan yang belum bayar.
- 4) Melakukan kegiatan pengamatan untuk menggali potensi sektor wajib pajak, baik mandatory maupun pilihan.
- 5) Melakukan penelitian material atas data PPhTB untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergali.
- 6) Melakukan kegiatan *asset tracing* secara rutin guna menemukan aset wajib pajak yang belum teridentifikasi sebelum utang pajak kedaluwarsa.

Dengan pendekatan ini, KPP tidak hanya mengandalkan data yang sudah ada, tetapi juga aktif melakukan verifikasi dan penelusuran langsung untuk menemukan potensi pajak yang terlewatkan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan peran kolaborasi antar instansi, seperti dengan PPNS Kanwil yang memperkuat pengawasan dan menegakkan hukum perpajakan. Kolaborasi ini dapat membantu menciptakan sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Secara keseluruhan, dengan penerapan strategi-strategi ini, KPP Pratama Gresik tidak hanya berfokus pada pencapaian angka penerimaan, tetapi juga berupaya menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif dalam pengelolaan pajak. Hal ini tidak hanya akan mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang lebih tinggi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang adil dan merata.

## 2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (1b-CP)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sem 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	112,52%	112,13%	112,13%	105,40%	105,40%	104,59%	104,59%
<b>Capaian</b>	112,52%	112,13%	112,13%	105,40%	105,40%	104,59%	104,59%

### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

### 2) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

### 3) Formula IKU

#### Formula

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120) =  $\left( \frac{\text{Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}}{100\%} \right) \times 100$

Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120) =  $\left[ 1 + \left( 1 - \frac{\text{Persentase deviasi akurasi perencanaan kas}}{10\%} \right) \right] \times 100$

**Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:**

(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left( \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

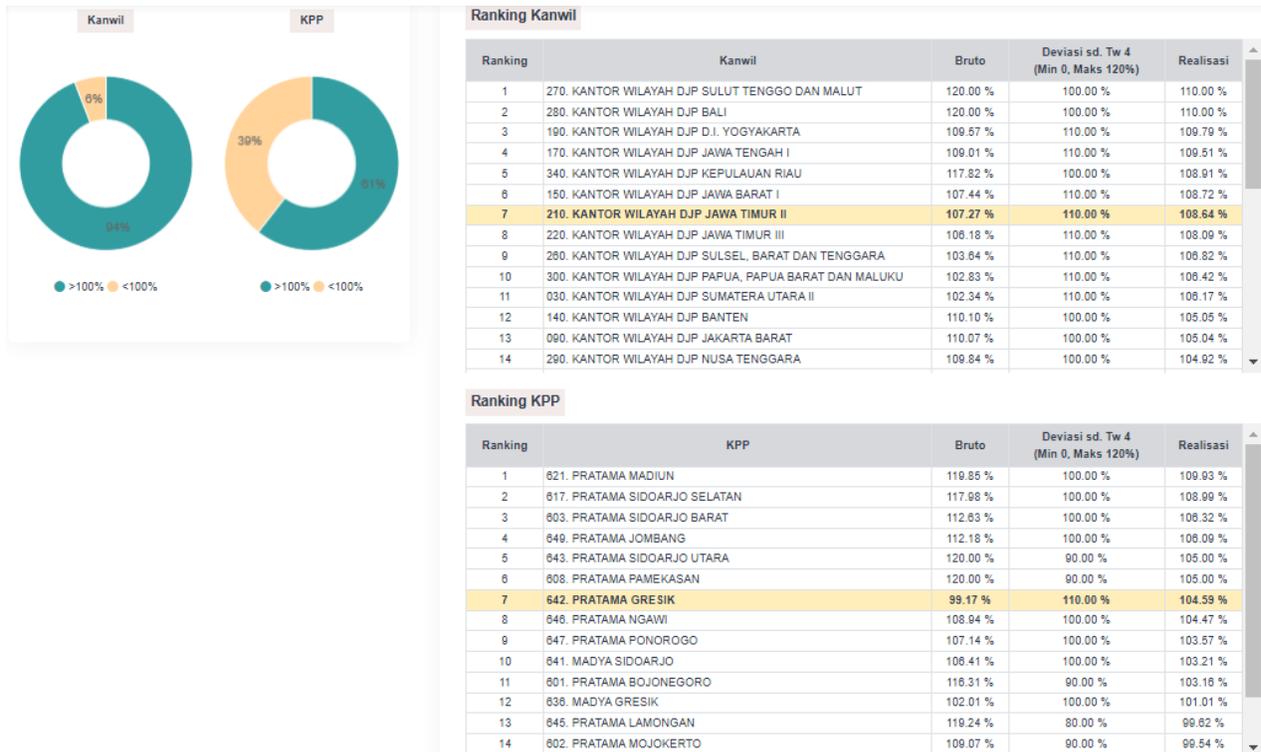
$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

#### 4) Realisasi IKU Tahun 2024



#### b. Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir (terakhir 2021)

Selama lima tahun terakhir, capaian kinerja atas Indeks Kinerja Utama (IKU) terkait penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan kode IKU 1b-CP menunjukkan hasil yang bervariasi. Berikut adalah rincian capaian kinerja pada setiap tahunnya:

Tahun	Target (%)	Capaian (%)
2021	100	105,28
2022	100	90,28
2023	100	120
2024	100	104,59

#### Tahun 2021

Target penerimaan pajak bruto ditetapkan sebesar 100%, dengan capaian yang tercatat sebesar 105,28%. Capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak bruto pada tahun 2021 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dengan deviasi positif yang signifikan.

#### Tahun 2022

Meskipun target yang ditetapkan tetap 100%, capaian pada tahun 2022 tercatat hanya 90,89%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana capaian tidak memenuhi target yang ditetapkan, dan deviasi yang terjadi bersifat negatif.

#### Tahun 2023

Capaian pada tahun 2023 mengalami lonjakan, dengan mencapai 120% dari target 100%. Ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak bruto pada tahun tersebut melampaui ekspektasi yang ada, dengan deviasi positif yang cukup signifikan.

#### Tahun 2024

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan tetap 100%, dan capaian yang tercatat adalah 104,59%. Meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023, capaian ini tetap melebihi target yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi pada capaian kinerja, secara rata-rata penerimaan pajak bruto dalam kurun waktu lima tahun terakhir berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Ke depan, upaya peningkatan penerimaan pajak akan terus dilakukan untuk memastikan pencapaian yang lebih konsisten dan optimal.

#### c. Upaya-upaya ekstra yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

KPP Pratama Gresik melakukan berbagai upaya untuk memastikan pencapaian target Indeks Kinerja Utama (IKU) yang mencakup pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya tersebut termasuk meningkatkan pengawasan terhadap pembayaran pajak, mempercepat proses administrasi penerimaan pajak, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pemantauan penerimaan dan proyeksi kas. Selain itu, upaya edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak dilakukan secara berkala agar mereka memahami pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan negara. Pengawasan pembayaran juga diterapkan untuk memastikan penerimaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan yang tercatat pada tahun 2021 dan 2023 (dengan capaian lebih dari 100%) menunjukkan bahwa strategi pengawasan dan edukasi yang dilakukan cukup efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, penurunan capaian pada tahun 2022, yang hanya tercapai 90,28%, disebabkan oleh pandemi covid-19 dan fluktuasi ekonomi yang berdampak pada kemampuan pembayaran pajak oleh beberapa sektor. Namun setelahnya sudah menunjukkan tren perbaikan.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

KPP Pratama Gresik memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang ada dan pengelolaan data secara berkala. Sistem informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memantau penerimaan dan perencanaan kas memungkinkan pemantauan yang lebih cepat dan akurat. Meski terbatas dalam merancang kebijakan, efisiensi ini membantu mempercepat proses pelaporan dan pengawasan yang berdampak langsung pada pencapaian target IKU.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program edukasi perpajakan yang berkesinambungan, serta peningkatan pengawasan terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak, merupakan faktor utama yang mendukung pencapaian target IKU yang optimal. Program sosialisasi kepada wajib pajak juga berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak. Kegagalan pencapaian pada tahun 2022 sebagian besar disebabkan oleh kondisi eksternal yang mempengaruhi pendapatan pajak, seperti penurunan aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, keberhasilan dan kegagalan kinerja terkait dengan respons terhadap kondisi eksternal dan efektivitas pengelolaan proyeksi kas.

- g. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

KPP Pratama Gresik telah melaksanakan rencana aksi yang mencakup pemantauan lebih intensif terhadap penerimaan pajak dan penyesuaian proyeksi kas berdasarkan analisis kondisi ekonomi yang lebih akurat. Dalam hal mitigasi risiko, KPP Pratama Gresik

menyesuaikan proyeksi kas agar lebih realistis dan mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

- h. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

Dalam pencapaian IKU, KPP Pratama Gresik memastikan bahwa seluruh wajib pajak, tanpa memandang gender atau kebutuhan khusus, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan perpajakan. Sistem administrasi berbasis digital yang ada memungkinkan wajib pajak dari berbagai latar belakang untuk mengakses layanan perpajakan dengan mudah. Selain itu, keberagaman wajib pajak yang tercatat membantu KPP dalam memastikan bahwa manfaat penerimaan pajak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

- i. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll

Penerimaan pajak yang optimal mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah melalui APBN, termasuk yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pencegahan stunting dan kesetaraan gender. Dengan pencapaian IKU yang positif, KPP Pratama Gresik turut berkontribusi terhadap APBN yang dapat digunakan untuk mendanai program-program ini, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

- j. Rencana aksi ke depan

Untuk ke depannya, KPP Pratama Gresik akan terus meningkatkan kualitas pengawasan penerimaan pajak serta membuat deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal ini akan dilakukan dengan memanfaatkan pengelolaan data informasi, serta memperkuat komunikasi dengan wajib pajak melalui program-program edukasi dan layanan yang lebih responsif. Rencana aksi ini bertujuan untuk memastikan pencapaian target yang lebih konsisten dan optimal, serta meminimalisir deviasi antara proyeksi dan realisasi penerimaan kas.

### 3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (2a-CP)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>		47%	47%	75%	75%	100%	100%
<b>Realisasi</b>		50.03%	50.03%	66.19%	66.19%	100.01%	100.01%
<b>Capaian</b>		106.45%	106.45%	88.25%	88.25%	100.01%	100.01%

#### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

#### 2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

#### 3) Formula IKU

<b>Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM</b>	<b>x 100%</b>
<b>Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM</b>	

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun terakhir

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	87,63%	115,54%	105,28%	100,01%

Kinerja IKU "Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)" selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021, realisasi berada di bawah target sebesar 87,63%. Kontraksi ekonomi akibat pandemi turut berdampak pada susutnya penerimaan pajak secara umum di tahun 2021.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan yang ditandai dengan capaian sebesar 115,54%, melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan ini didukung oleh pemulihan ekonomi paska pandemic yang semakin kuat. Pencapaian ini secara khusus turut didukung di antaranya dengan digulirkannya Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diamanatkan melalui penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Trend positif penerimaan pajak pada KPP Pratama Gresik terus berlanjut di Tahun 2023. Hal ini di topang di antaranya oleh kontribusi positif tumbuhnya Kawasan industri terintegrasi seperti *Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE)*, yang memberikan dampak besar terhadap tumbuhnya perekonomian lokal dan nasional. Kita tahu Bersama bahwa di tahun inilah dibangun smelter PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 105,28%, kinerja tetap berada di atas target.

Di tahun 2024, realisasi mencapai 100,01%, mencerminkan stabilitas pengawasan meskipun terjadi penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Keberlanjutan reformasi perpajakan, peningkatan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pajak, serta fokus pada penguatan pengawasan menjadi faktor utama pencapaian ini.

- c. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan penurunan kinerja penerimaan secara umum di KPP Pratama Gresik tahun 2024 diantaranya:

- 1) Terdapat polarisasi masalah wajib pajak dengan status cabang yang menjadi tumpuan penerimaan KPP Pratama Gresik. Banyak wajib pajak merupakan wajib pajak cabang dengan tingkat volatilitas penerimaan antar tahun, serta penerapan aturan tarif efektif rata-rata sehingga mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21;
- 2) Penetapan target penerimaan didasarkan pertumbuhan antar tahun sehingga jika mengacu pada poin a di atas, KPP Pratama Gresik harus mengerahkan *effort* lebih untuk mencari sumber baru penerimaan pajak tahun 2024;
- 3) Penetapan target penerimaan yang besar berimbas pada pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Gresik yang lain karena penerimaan menjadi variabel utama penghitungan IKU.

Menindaklanjuti kondisi tersebut telah dilakukan beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelitian kepatuhan materiil atas wajib pajak yang menjadi sumber penerimaan terbesar atas tahun pajak sebelumnya melalui analisis data internal maupun *visit* kepada wajib pajak;
- 2) Mengidentifikasi sumber penerimaan baru yang dapat digali melalui penggalian potensi per sektor dengan mempertimbangkan kesesuaian monografi fiskal wilayah yang diampu;
- 3) Mengidentifikasi faktor pajak pembelian 000 yang status WP NE atau tidak lapor, walaupun data tersebut tidak signifikan akan tetapi apabila dilakukan terhadap banyak wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU "Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada desa-desa tentang penyetoran PPh dan PPN yang terutang atas penggunaan dana APBDes tahun anggaran 2024, yang mana banyak desa yang pada waktu itu belum melakukan penyetoran.

Selanjutnya adalah melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak-Wajib Pajak yang belum melakukan penyetoran pajak di tahun berjalan terutama PPN agar segera

melakukan penyetoran. Terakhir kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan kolaborasi rutin dengan pihak penyidik kanwil untuk Wajib Pajak yang kurang punya itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi kinerja pada tahun 2025 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah:

- 1) Untuk risiko tidak tercapainya target penerimaan dari penerbitan STP atas tahun berjalan adalah dengan melakukan pengawasan pelaporan SPT Masa tahun berjalan dan pembayaran Masa tahun berjalan, dengan memanfaatkan data pada aplikasi dashboard manajemen penerimaan. Data hasil pengawasan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh aktor dengan penerbitan STP diluar dafnom STP.
- 2) Untuk risiko tidak tercapainya target penerimaan dari data matching atas tahun berjalan adalah dengan melakukan kegiatan pengawasan terhadap pembayaran pada tahun berjalan dengan penelitian pembayaran masa yang tidak/belum disetorkan, maupun identifikasi kemungkinan adanya potensi kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang dapat ditindaklanjuti secara formal dengan penerbitan SP2DK.
- 3) Untuk risiko tidak tercapainya target penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi adalah dengan melakukan analisis dan penelitian atas sektor-sektor yang membutuhkan NPWP namun belum memiliki NPWP untuk kemudian dilakukan pendataan dan penginputan data melalui skema KPDL yang dapat kemudian ditindaklanjuti dengan SP2DKE dan LHP2DKE dengan success rate, tidak hanya secara kuantitas namun juga kualitas dengan pembayaran, yang lebih tinggi dibandingkan data DSE yang diturunkan melalui skema DSPE.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Berdasarkan identifikasi mitigasi risiko besarnya penetapan target penerimaan, beberapa langkah telah diambil untuk mengatasi kendala-kendala mulai dari awal tahun dengan melibatkan sumber daya internal maupun *Stakeholder*. Pengamanan penerimaan difokuskan pada dua hal yaitu pengamanan pengawasan pembayaran masa, serta penggalian potensi baru berdasarkan sektor yang menjadi karakteristik wilayah diampu.

Pengawasan Pembayaran Masa dilakukan dengan melakukan langkah konkret sebagai berikut:

- 1) Melakukan penjagaan dan eksekusi seketika terhadap data data yang diturunkan melalui aplikasi internal seperti data pemicu tahun berjalan, penerbitan Surat Tagihan Pajak, maupun angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan;
- 2) Visitasi dan koordinasi dengan wajib pajak penentu penerimaan terbesar untuk memastikan nilai bayar pajak sehingga dapat melakukan identifikasi awal langkah yang diambil;
- 3) Koordinasi dengan instansi pemerintah mulai awal tahun untuk menjaga penerimaan yang berasal dari Pemotongan dan Pemungutan PPh oleh Instansi Pemerintah baik Pusat, Kabupaten/ Kota, serta Bendahara Desa

Penggalian potensi baru dapat dijabarkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data dengan fokus sektor perdagangan melalui data pembelian dengan faktur pajak menggunakan NPWP 00.000.000.0.000.000 dan diidentifikasi dengan menggunakan data eksternal untuk disesuaikan dengan data internal atas kesesuaian subjek pajaknya;
- 2) Memaksimalkan penggalian potensi Bendahara Desa, BUM Des, dan Koperasi serta rekanan Pemerintah Desa dengan visitasi dan koordinasi Camat setempat;
- 3) Pengawasan Kepatuhan Material atas data selain Daftar Prioritas Pengawasan berdasarkan data yang ada melalui *Wider Revenue Activity* pada aplikasi DRM.

g. Rencana aksi tahun selanjutnya

Penerimaan pajak melalui kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa yang berhasil dihimpun oleh KPP Pratama Gresik memang cukup menggembirakan namun demikian evaluasi dan penguatan strategi tetap diperlukan agar tren positif pada tahun-tahun sebelumnya dapat kembali dicapai di masa depan. Adapun upaya lebih lanjut yang kami canangkan untuk dilaksanakan ke depan untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Penyampaian surat imbauan kepada Wajib Pajak yang memiliki kewajiban perpajakan PPh Pasal 25/29 atau PPh Final Pasal 4 ayat PP 23 untuk patuh secara ketentuan dalam pemenuhan kewajiban pajak setiap masanya;

- 2) Pelaksanaan sosialisasi perpajakan dan monitoring untuk Wajib Pajak Bendahara Pemerintah dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah Desa;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data lapangan untuk mendapatkan potensi-potensi penerimaan baru dari kegiatan ekonomi;
- 4) Melakukan kegiatan kunjungan kepada Wajib Pajak yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar guna menjalin komunikasi yang baik, mendapatkan potret kemajuan usahanya serta pendampingan dalam pemenuhan hak serta kewajiban pajaknya;
- 5) Melakukan kolaborasi dengan penyidik dalam pengawasan Wajib Pajak.

#### 4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sem 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	87.65%	97.64%	97.64%	98.76%	98.76%	100.98%	100.98%
<b>Capaian</b>	120	120	120	109.73	109.73	100.98	100.98

- 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- 2) Definisi IKU

- a) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- b) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.
- c) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan

dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

- d) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- e) kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- f) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- g) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- h) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

### 3) Formula IKU

Formula	
$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$	

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,49%	100,56%	67,76%	100,01%

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik tahun 2024 adalah sebesar 100.98% yang berarti telah melampaui jumlah target yang direncanakan sebanyak 72.925 SPT. Jumlah capaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang hanya tercapai sebesar 67.76%. Sedangkan realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di tahun 2022 adalah sebesar 100.56% dan 101.49% pada tahun 2021. Hal ini menjadikan capaian realisasi pada tahun 2024 adalah capaian tertinggi kedua sejak tahun 2021.

Capaian Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan penting dilakukan demi mendukung sasaran strategis DJP berupa sistem informasi yang andal dan terintegrasi dimana tingginya partisipasi akan pelaporan SPT Tahunan diharap akan membuat data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak akan semakin akurat dan dapat diandalkan untuk kepentingan lain yang lebih besar seperti kepentingan penerimaan maupun menentukan kebijakan fiskal.

- c. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Upaya tambahan yang dilakukan untuk menunjang tercapainya target IKU terkait kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan antara lain:

- 1) Menghimbau Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan dilakukan melalui media komunikasi Whatsapp blast dan juga SMS Blast termasuk pemberitahuan terkait adanya layanan diluar kantor
- 2) Menyediakan layanan luring untuk konsultasi SPT Tahunan secara daring berupa nomor layanan konsultasi Whatsapp dan juga layanan Whatsapp helpdesk.
- 3) Bekerja sama dengan Individu berpengaruh yaitu Kepala Kepolisian Resor Gresik dalam pekan panutan untuk menyontohkan teladan baik pelaporan SPT Tahunan tepat waktu sekaligus mengajak masyarakat untuk melaksanakan kewajiban Pelaporan SPT Tahunan.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam rangka pencapaian target atas kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, tentunya tak lepas dari hambatan-hambatan yang timbul seperti kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban pelaporan SPT Tahunan, kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan serta masih banyak Wajib Pajak yang kurang familiar dengan teknologi informasi saat ini. Menghadapi hal tersebut, upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Gresik antara lain:

- 1) Sebagai kota industri dengan jumlah perusahaan besar yang cukup banyak, KPP Pratama Gresik melakukan penghimbauan kepada Pemberi Kerja di wilayah kabupaten Gresik terutama yang memiliki jumlah karyawan yang besar untuk segera menerbitkan bukti potong dan mengingatkan karyawannya untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan sesegera mungkin.
- 2) KPP Pratama Gresik juga menghimbau Instansi Pemerintah untuk segera menerbitkan bukti potong untuk ASN mereka dan juga menghimbau ASN di wilayah kabupaten Gresik untuk melaporkan SPT Tahunannya.
- 3) Memasang beberapa media publikasi seperti baliho dan spanduk di tempat-tempat strategis yang dapat dilihat masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan

- 4) Mengadakan Pojok Pajak di kecamatan-kecamatan wilayah kabupaten Gresik secara rutin untuk mempermudah Wajib Pajak terutama yang tempat tinggalnya jauh dengan kantor KPP Pratama Gresik.
- 5) Mengadakan kelas pajak secara luring dan daring terkait tata cara penyampaian SPT Tahunan.

Keberhasilan capaian presentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang terjadi pada tahun 2024 terjadi karena upaya-upaya yang telah tersebut diatas dilakukan lebih massif dan lebih terarah daripada tahun sebelumnya juga upaya-upaya tersebut dilakukan lebih awal sehingga memberi ruang perbaikan rencana apabila upaya yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Keberhasilan capaian IKU pelaporan SPT Tahunan juga dapat terwujud karena adanya kemauan yang kuat dari seluruh jajaran KPP Pratama Gresik untuk mencapai hal tersebut serta adanya dukungan dari semua pihak yang terlibat termasuk pihak eksternal yaitu segenap Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Gresik.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya terkait tercapainya target kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dapat dibagi menjadi dua yaitu

1) Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kenaikan kepatuhan yang sangat signifikan bisa jadi mencerminkan peningkatan produktivitas dan kinerja SDM di KPP Pratama Gresik. Ini dapat terjadi karena beberapa hal misalnya karena adanya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM, Distribusi Tugas yang Lebih Efektif yang lebih terstruktur dan efisien, yang memungkinkan pegawai fokus pada area-area prioritas. Selain itu kerja sama serta koordinasi yang baik antar pegawai di KPP Pratama Gresik juga mencerminkan keefisienan SDM di KPP Pratama Gresik.

2) Efisiensi Sumber Daya Teknologi

KPP Pratama Gresik melakukan efisiensi sumber daya teknologi dengan menyediakan perangkat dan jaringan yang memadai untuk kelancaran pelaporan SPT Tahunan dan juga memaksimalkan gawai yang dibawa sendiri oleh Wajib Pajak sehingga selain target pelaporan yang tercapai juga sekaligus memberikan edukasi bagi Wajib Pajak dengan perangkat yang familiar bagi Wajib Pajak sehingga

diharapkan di masa selanjutnya Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunannya secara mandiri. Selain itu sumber daya teknologi juga digunakan untuk memantau analitik jumlah pelaporan SPT Tahunan yang dapat digunakan untuk menentukan strategi kedepannya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kepatuhan pelaporan SPT Tahunan antara lain:

- 1) Kegiatan Pojok Pajak yang diadakan di kantor kecamatan wilayah kabupaten Gresik secara rutin yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak terutama bagi yang tempat tinggalnya jauh dengan kantor KPP Pratama Gresik;
- 2) Kegiatan kelas pajak yang dilakukan secara luring dan daring terkait tata cara penyampaian SPT Tahunan yang sekaligus sebagai sarana edukasi bagi Wajib Pajak;
- 3) Layanan komunikasi dan konsultasi melalui kanal Whatsapp KPP Pratama Gresik termasuk Whatsapp blast dan SMS Blast.

g. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Dalam mencapai tujuan target kepatuhan pelaporan SPT Tahunan telah disusun rencana aksi yang akan dilakukan serta ada pula mitigasi risiko yang disiapkan untuk menghadapi kemungkinan risiko yang timbul, antara lain:

- 1) Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak secara berkala. Dan juga melakukan mengidentifikasi WP yang berisiko tidak menyampaikan SPT tepat waktu dan memberikan pengingat melalui berbagai kanal komunikasi misalnya SMS/Whatsapp blast serta memberikan layanan konsultasi untuk Wajib Pajak baik secara luring maupun daring;
- 2) Melakukan penyuluhan secara terus-menerus kepada Wajib Pajak yang terdaftar tentang kewajiban melaporkan SPT Tahunan;
- 3) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya perangkat serta jaringan serta penyediaan tempat khusus untuk pelaporan SPT Tahunan;
- 4) Memberikan pengingat di awal waktu pelaporan untuk menghindari gangguan sistem di batas akhir pelaporan SPT Tahunan.

- h. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

Dalam mewujudkan tercapainya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi telah memperhatikan akses, kontrol, partisipasi serta manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan aspek *Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI)* terwujud dalam fasilitas gedung kantor yang memiliki akses khusus bagi penyandang disabilitas dan lain sebagainya.

- i. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam kaitannya dengan upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem. Capaian kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang merupakan wujud dari sistem self-assessment perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Pelaporan SPT tahunan merupakan serangkaian kewajiban Wajib Pajak selain kewajiban untuk membayar pajak.

Adanya pelaporan SPT tahunan dapat digunakan sebagai data awal bagi petugas pajak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang nantinya dapat berguna untuk menggali potensi pajak yang mungkin ada sehingga dapat menambah penerimaan dari sektor perpajakan yang berguna untuk membantu menangani isu-isu tersebut diatas. Penerimaan pajak sebagai sumber utama pos penerimaan APBN tentu berdampak langsung bagi penyelesaian isu utama yang sedang dimitigasi pemerintah

- j. Rencana Aksi ke Depan

Demi menjaga capaian kinerja yang sudah baik pada tahun 2024 dan mewujudkan capaian yang lebih baik di tahun-tahun selanjutnya perlu adanya rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya, KPP Pratama Gresik akan mempertahankan program yang terbukti efektif dilakukan dan akan melakukan perbaikan terhadap kendala dan kekurangan yang ditemui selama pelaksanaan program/kegiatan seperti menambah jumlah sasaran Wajib Pajak yang menjadi sasaran Whatsapp/SMS blast, melaksanakan layanan luring dan daring lebih awal mulai bulan Januari maupun meningkatkan kualitas perangkat dan jaringan yang digunakan selama melayani Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

## 5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>21,10%</b>	<b>22.34%</b>	<b>22.34%</b>	<b>31.69%</b>	<b>31.69%</b>	<b>100.64%</b>	<b>100.64%</b>
<b>Capaian</b>	<b>84,40%</b>	<b>44,68%</b>	<b>44,68%</b>	<b>42,25%</b>	<b>42,25%</b>	<b>100,64%</b>	<b>100,64%</b>

### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

### 2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak

### 3) Formula IKU

<b>Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM</b>	<b>x 100%</b>
<b>Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM</b>	

### 4) Realisasi IKU

No	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Capaian 2023	% Capaian 2024
A	PPh Non Migas	115.397.542.000	206.160.379.420	115.652.789.951	59,88%	-43,90%	131,92%	100,22%
B	PPN & PPn BM	67.525.500.000	70.843.101.734	68.441.763.566	-55,91%	-3,39%	100,49%	101,36%
C	PBB	425.250.000	529.838.070	437.328.699	262,64%	-17,46%	100,78%	102,84%
D	Pajak Lainnya	25.150.000	2.100.991.571	20.000.000	292,56%	-99,05%	8353,84%	79,52%
E	PPh Migas							
<b>Total</b>		<b>183.373.442.000</b>	<b>279.634.310.795</b>	<b>184.551.882.216</b>	<b>-3,68%</b>	<b>-34,00%</b>	<b>123,01%</b>	<b>100,64%</b>

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 184.551.882.216 dengan capaian sebesar 100,64% dari target sebesar Rp 183,373,442,000. Pertumbuhan realisasi pada periode ini -34,00%.

Sebesar 50% jenis pajak tumbuh positif pada periode ini, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri sebesar Rp 68.409.925.058 (growth-3,41%). Penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp 63.377.500.246 (growth 186,62%) dan PPh Final sebesar Rp19.356.316.277 (growth 26,96%).

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2023	2024	Δ % 2022 - 2023	Δ % 2023 - 2024	% Capaian 2023	% Capaian 2024
<b>A</b>	<b>PPh Non Migas</b>	<b>115.397.542.000</b>	<b>206.160.379.420</b>	<b>115.652.789.951</b>	<b>59,88%</b>	<b>-43,90%</b>	<b>131,92%</b>	<b>100,22%</b>
	1. PPh Pasal 21	16.525.000.000	154.041.862.472	16.713.587.914	87,36%	-89,15%	140,81%	101,14%
	2. PPh Pasal 22	3.350.000.000	2.769.465.685	3.372.786.580	-35,04%	21,78%	108,61%	100,68%
	3. PPh Pasal 22 Impor	-	51.000	1.164.016	63,46%	2182,38%		
	4. PPh Pasal 23	5.500.000.000	10.534.350.807	5.523.354.629	70,65%	-47,57%	200,65%	100,42%
	5. PPh Pasal 25/29 OP	6.750.000.000	1.428.063.933	6.821.009.948	73,95%	377,64%	105,78%	101,05%
	6. PPh Pasal 25/29 Badan	62.500.000.000	22.112.169.593	63.377.500.246	37,80%	186,62%	98,06%	101,40%
	7. PPh Pasal 26	500.000.000	27.873.148	486.360.841	-99,66%	1644,91%	109,31%	97,27%
	8. PPh Final	20.272.542.000	15.246.542.782	19.356.316.277	34,99%	26,96%	100,64%	95,48%
	9. PPh Non Migas Lainnya			709.500	-100,00%			
<b>B</b>	<b>PPN dan PPnBM</b>	<b>67.525.500.000</b>	<b>70.843.101.734</b>	<b>68.441.763.566</b>	<b>-55,91%</b>	<b>-3,39%</b>	<b>100,49%</b>	<b>101,36%</b>
	1. PPN Dalam Negeri	67.525.500.000	70.827.937.887	68.409.925.058	-55,90%	-3,41%	100,46%	101,31%
	2. PPN Impor	-	204.000		-87,81%	-100,00%		
	3. PPnBM Dalam Negeri	-	2.035.593	1.323.900	-86,23%	-34,96%		
	4. PPnBM Impor	-	12.924.254	30.514.608	-80,20%	136,10%		
	5. PPN/PPnBM Lainnya							
<b>C</b>	<b>PBB</b>	<b>425.250.000</b>	<b>529.838.070</b>	<b>437.328.699</b>	<b>262,64%</b>	<b>-17,46%</b>	<b>100,78%</b>	<b>102,84%</b>
<b>D</b>	<b>Pajak Lainnya</b>	<b>25.150.000</b>	<b>2.100.991.571</b>	<b>20.000.000</b>	<b>292,56%</b>	<b>-99,05%</b>	<b>8353,84%</b>	<b>79,52%</b>
<b>E</b>	<b>PPh Migas</b>							
<b>Total</b>		<b>183.373.442.000</b>	<b>279.634.310.795</b>	<b>184.551.882.216</b>	<b>-3,68%</b>	<b>-34,00%</b>	<b>123,01%</b>	<b>100,64%</b>

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
<b>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</b>	100%	-	100%	100,04%

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja)

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- 1) Sektor-sektor usaha dominan di Kabupaten Gresik tumbuh positif;
- 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
- 3) Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
- 4) Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

d. Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
<b>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</b>	107,25%	88,14%	118,91%	107,04%	100,04%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 107,25%. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 88,14%. Di tahun 2022 naik kembali menjadi 118,91%.

Dikuti tahun 2023 sebesar 107,04%. Kemudian pada tahun 2024 tetap berhasil diatas 100% yaitu sebesar 100,04%. Total target 2024 adalah sebesar Rp 3.155.472.249.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 3.156.889.435.820,00.

e. Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020– 2024 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Perbandingan capaian target terutama untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan (PKM)	100%	100%	100,64%

Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri dan meningkatnya konsumsi masyarakat, serta pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri.

f. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong fungsi pengawasan melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- 2) Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- 3) Penelitian dan tindak lanjut hasil data *matching*.
- 4) Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.

- 5) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
  - 6) Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
  - 7) Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*
- g. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan netto mayoritas sektor utama tercatat positif.

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P *lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
  - Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap pegawai KPP Pratama Gresik yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
  - Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
  - Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.
- 2) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
    - Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
    - Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
    - Adanya setoran di tahun 2023 yang tidak terulang di tahun 2024.

- h. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penghematan atas pemanfaatan sumber daya terutama listrik ketika di luar jam kerja
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

i. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan NIK dengan NPWP
- 2) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan (DSPP)
- 3) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

j. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah:

- 1) Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- 2) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- 3) Risikososial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- k. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - 3) Redistribusi Pajak melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- l. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
- 1) Pajak dapat digunakan sebagai dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi pada golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi/ bantuan langsung tunai
- m. Rencana aksi tahun selanjutnya
- 1) Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP, dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan

- 2) Menyusun strategi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2025 dan untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai target yang telah ditetapkan
- 3) Melaksanakan pendistribusian target penerimaan pajak per jenis pajak dan per fungsi sesuai tupoksi
- 4) Melaksanakan rapat pimpinan secara teratur; dan mencari solusi atas berbagai kendala yang terjadi

## 6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sem 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
<b>Realisasi</b>	12.25%	59.69%	59.69%	85.44%	85.44%	88.80%	88.80%
<b>Capaian</b>	120	120	120	120	120	120	120

### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

### 2) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- a) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

- b) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- c) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

3) Formula IKU

Formula:
$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
<b>Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan</b>	80,4%	80,4%	84%	88,8%

Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan selama tahun 2024 selalu terealisasi melampaui target di tiap kuartal menunjukkan tingginya komitmen KPP Pratama Gresik terhadap tercapainya perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Presentase capaian pada tahun 2024 juga merupakan capaian tertinggi sejak 2021 dengan capaian pada Q4 mencapai 88.80% dari target yang ditetapkan sebesar 74%. Realisasi capaian yang melampaui target ini juga mendukung rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak yaitu penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.

- c. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
  - 1) Memanfaatkan teknologi seperti Whatsapp/SMS blast serta unggahan pada akun resmi media sosial KPP Pratama Gresik dalam menyampaikan undangan maupun pemberitahuan tentang adanya suatu kegiatan penyuluhan.

- 2) Memanfaatkan berbagai macam platform daring sebagai media penyuluhan baik yang bersifat dua arah seperti kelas pajak online dan Instagram live maupun penyuluhan yang sifatnya satu arah seperti podcast perpajakan.
- 3) Aktif mengunggah berbagai konten edukasi perpajakan di sosial media resmi KPP Pratama Gresik baik berbentuk infografis maupun konten pendek audiovisual.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tercapainya kinerja terkait perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan diatas target yang ditetapkan dan juga dengan capaian melebihi capaian di tahun-tahun sebelumnya membuktikan bahwa strategi dan rencana yang digunakan lebih efektif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP. Dalam mencapai hal tersebut, telah dilaksanakan Langkah-langkah diantaranya:

- 1) Merencanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan skala prioritas terkait urgensinya baik terkait topik yang akan disampaikan maupun waktu pelaksanaan.
- 2) Meskipun utamanya kegiatan penyuluhan dilakukan oleh fungsional penyuluh maupun asisten penyuluh namun dalam mencapai IKU penyuluhan juga bekerja sama dengan pegawai lain terutama pegawai pelaksana untuk menunjang kelancaran kegiatan penyuluhan.
- 3) Dalam melakukan penyuluhan, KPP Pratama Gresik juga tak lupa bekerja sama dengan pihak eksternal sebagai pihak yang menerima penyuluhan maupun dengan pihak yang menjadi penjembaran KPP Pratama Gresik dengan target penyuluhan seperti instansi pemerintah, kepada daerah, himpunan atau perkumpulan profesi dan sebagainya.
- 4) Melaksanakan kegiatan penyuluhan semaksimal mungkin dengan melaksanakannya luring dan juga daring

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mencapai pemenuhan IKU perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan telah dilakukan efisiensi terhadap sumber daya yang ada, antara lain yaitu efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan dengan memaksimalkan sinergi dari seluruh fungsional penyuluh pajak maupun asisten penyuluh pajak dalam

melakukan penyuluhan dan ditambah dengan adanya dukungan dari pelaksana di KPP Pratama Gresik juga dengan Account Representative sebagai pengampu Wajib Pajak.

Selain efisiensi SDM, sudah tersebut pada poin sebelumnya bahwa kegiatan penyuluhan juga dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya teknologi berupa penyuluhan secara daring melalui berbagai media sehingga menjangkau lebih banyak masyarakat. Adanya program podcast perpajakan juga menunjukkan efisiensi karena untuk materi yang sama dapat ditonton berulang kali dan kapanpun sehingga lebih aksesibel bagi Wajib Pajak.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian target IKU perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan terjadi karena banyak faktor, namun beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan tersebut antara lain:

- 1) Perencanaan kegiatan selama satu tahun yang dilakukan di awal tahun. Hal ini memungkinkan persiapan yang lebih matang terkait dengan rencana penyuluhan yang akan dilakukan dan juga membuat kegiatan penyuluhan lebih terorganisir.
- 2) Kegiatan penyuluhan yang dilakukan melalui dua cara (luring dan daring) juga dapat dikatakan menjadi faktor penting dalam pencapaian IKU penyuluhan, karena dengan melakukan penyuluhan secara luring dan daring berarti memaksimalkan upaya penyuluhan dalam mengedukasi Wajib Pajak.

- g. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Dalam mencapai tujuan target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan telah disusun rencana aksi yang akan dilakukan serta ada pula mitigasi risiko yang disiapkan untuk menghadapi kemungkinan risiko yang timbul, antara lain:

- 1) Merencanakan kegiatan penyuluhan selama satu tahun yang dilakukan di awal tahun;
- 2) Selalu memperbarui informasi tentang peraturan terbaru yang berlaku sehingga penyuluhan dan edukasi yang dilakukan selalu relevan, update dan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak;

- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan untuk memastikan kegiatan penyuluhan efektif dan tepat sasaran serta sebagai saran perbaikan untuk kegiatan penyuluhan selanjutnya;
  - 4) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk keperluan kegiatan edukasi dan penyuluhan termasuk meningkatkan kerja sama internal dengan Account Representative dan juru sita;
  - 5) Meningkatkan kerja sama dengan pihak eksternal selaku penerima manfaat maupundengan pihak eksternal selaku fasilitator untuk kegiatan penyuluhan seperti dengan instansi pemerintahan dan ikatan profesi dan lain-lain.
- h. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*
- Edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan di KPP Pratama Gresik dilakukan dalam berbagai format serta memanfaatkannya berbagai macam media dengan mengutamakan kegunaan dan juga kemudahan akses bagi penerima manfaat (Wajib Pajak) juga edukasi dan penyuluhan dilakukan tanpa memberikan eksklusifitas terhadap kelompok tertentu namun tetap memperhatikan kesesuaian materi penyuluhan yang diberikan.
- i. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.
- Edukasi dan penyuluhan yang berpengaruh terhadap perubahan perilaku Wajib Pajak untuk membayar serta melaporkan pajaknya adalah bukti nyata dukungan terhadap pemerintah untuk mengentaskan isu-isu utama seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan pencegahan *stunting*. Kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak yang timbul setelah dilakukannya edukasi dan penyuluhan akan membantu tercapainya penerimaan pajak yang selanjutnya digunakan langsung untuk mengatasi isu-isu tersebut
- j. Rencana Aksi ke Depan
- Untuk mempertahankan prestasi capaian pada tahun 2024, maka di tahun 2025 rencana aksi terkait penyuluhan adalah:

- 1) Tetap mempertahankan cara penyuluhan yang masih relevan dan memperbaiki kekurangan serta kendala yang terjadi di tahun sebelumnya sehingga penyuluhan menjadi lebih efektif;
- 2) Memperbaiki kualitas konten penyuluhan yang memanfaatkan teknologi media, seperti kualitas suara serta visual pada konten *podcast*;
- 3) Memaksimalkan kerja sama dengan pihak eksternal selaku sasaran penyuluhan agar materi penyuluhan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan akan mendorong perubahan perilaku Wajib Pajak ke arah yang lebih baik terutama perilaku terkait kewajiban WP berupa pelaporan dan pembayaran pajak.

## 7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan (4b-N)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sem 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	5%	10%	10%	15%	15%	85%	100%
<b>Realisasi</b>	6.23%	12%	12%	18%	18%	86.13%	107.29%
<b>Capaian</b>	120	120	120	120	120	101.33	107.29

- 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- 2) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan *stakeholders* lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

- a) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- b) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

c) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- a) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- c) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

### 3) Formula IKU

Indeks Hasil Survei
---------------------

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
<b>Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan</b>	79,75%	95,23%	82,30%	107,29%

Capaian atas Indeks Kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 di KPP Pratama Gresik pada tahun 2024 tercapai sebesar 86.13% dari target 85% atau tercapai 107.29% dari total target. Capaian ini merupakan capaian tertinggi kedua

sejak tahun 2021, Dimana capaian tertinggi adalah pada tahun 2022 dengan capaian 119.04%.

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan termasuk dalam rencana strategis DJP yaitu organisasi dan SDM yang optimal dimana capaian IKU ini dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan yang telah dilakukan di KPP Pratama Gresik yang terkait dengan layanan perpajakan secara umum maupun mengukur tentang kualitas penyuluhan dan edukasi yang dilakukan.

c. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam mencapai capaian terkait Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, KPP Pratama Gresik juga melakukan beberapa upaya ekstra antara lain:

- 1) Mengoptimalkan sarana dan media terutama terkait edukasi untuk memastikan Wajib Pajak mendapatkan edukasi dan informasi secara maksimal
- 2) Menyediakan saluran untuk memberi *feedback* atas layanan dan juga edukasi yang diterima sebagai evaluasi atas layanan dan edukasi yang telah diberikan yang diberi tajuk “PUDAK 642” (Pojok Ulasan dan Kepuasan 642)

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 di KPP Pratama Gresik telah mencapai target yang ditentukan namun dalam mencapai hal tersebut terdapat beberapa kendala yang ditemui antara lain adanya wajib pajak yang kurang memahami prosedur layanan maupun aturan perpajakan dan juga karena kepuasan Wajib Pajak atas layanan dan efektivitas penyuluhan ini bersifat subjektif. Atas kendala yang terjadi tersebut diambil Langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemilihan responden dilakukan secara merata.
- 2) Menyediakan informasi tentang persyaratan, prosedur dan standar waktu baik terkait pelayanan dan juga edukasi
- 3) Meningkatkan kualitas layanan dan edukasi dari segi SDM yaitu melalui diadakannya *In House Training* (IHT) secara berkala.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya juga dilakukan dalam mencapai IKU ini yaitu melalui selalu adanya pelatihan (*In House Training*) yang menunjang kualitas pelayanan serta edukasi yang diberikan untuk menjamin SDM yang semakin berkualitas. Pemanfaatan teknologi juga banyak digunakan demi memenuhi ekspektasi Wajib Pajak tentang kebutuhan akan layanan perpajakan dan juga informasi perpajakan seperti menyediakan layanan berbasis *whatsapp chat*, edukasi melalui *podcast* maupun *live* Instagram yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelatihan yang diberikan kepada tenaga pemberi layanan serta edukator yang selalu dilakukan dan senantiasa diperbaiki dan diperbarui memainkan peran yang besar dalam pencapaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Namun, selain hal tersebut ada pula program kegiatan yang dilakukan yang menunjang keberhasilan atas pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) Adanya layanan daring berupa tersedianya *Whatsapp* layanan dan juga *helpdesk* yang memungkinkan Wajib Pajak mendapat edukasi maupun layanan tanpa harus datang ke Kantor Pajak dimana layanan ini sangat membantu Wajib Pajak dalam hak efektifitas waktu serta jika Wajib Pajak masih membutuhkan layanan langsung ke Kantor Pajak, maka Wajib Pajak telah mendapat informasi terlebih dahulu yang diharapkan membuat layanan di kantor pajak efektif dan efisien.
- 2) Adanya program “PUDAK 642” yang merupakan sarana pemberian umpan balik bagi Wajib Pajak yang menerima layanan di KPP Pratama Gresik juga membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan dan edukasi karena “PUDAK 642” dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemberi layanan dan educator di KPP Pratama Gresik.

g. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Rencana aksi dan juga mitigasi risiko yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam mencapai IKU ini telah dilaksanakan dengan baik yang diawali dengan pemilihan responden yang dilakukan secara terukur dan sesuai dengan kriteria yang diminta serta selalu adanya evaluasi secara rutin terkait dengan standar pelayanan dan juga penyuluhan. Pelatihan kepada petugas pemberi layanan juga dilakukan secara berkala

untuk memastikan kualitas pelayanan tetap baik dan dilakukan seefektif mungkin. Pemaksimalan penggunaan teknologi juga dilakukan untuk menunjang optimalisasi kepuasan Wajib Pajak terhadap layanan di KPP Pratama Gresik.

- h. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

Semua kegiatan pelayanan dan edukasi serta penyuluhan yang dilaksanakan di KPP Pratama Gresik dilakukan dengan mengutamakan kebermanfaatannya dan juga kemudahan akses bagi penerima manfaat (Wajib Pajak). Tersedianya sarana dan prasarana di KPP Pratama Gresik yang memudahkan kelompok rentan seperti akses khusus bagi penyandang disabilitas, lahan parkir khusus untuk wanita, dan lain sebagainya juga merupakan bukti komitmen KPP Pratama Gresik dalam memberikan layanan optimal kepada seluruh masyarakat.

- i. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pentingnya capaian indeks kepuasan atas layanan dan juga efektivitas penyuluhan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap KPP Pratama Gresik atau kepada Direktorat Jenderal Pajak secara umum. Peningkatan kepercayaan masyarakat diharapkan akan menjadi stimulus dikemudian hari untuk masyarakat taat membayar pajak demi tercapainya penerimaan negara. Penerimaan negara melalui pajak ini kemudian akan disalurkan kembali ke masyarakat melalui program-program pemerintah yang sudah dicanangkan terutama untuk isu-isu utama yang sedang dihadapi pemerintah saat ini yakni yang terkait dengan perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, serta pengentasan kemiskinan ekstrem yang terjadi saat ini

- j. Rencana aksi ke depan

Rencana aksi yang dipersiapkan dalam mencapai IKU Indeks Kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan untuk tahun selanjutnya antara lain:

- 1) Mempersiapkan basis data yang akan dijadikan responden secara terukur dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan agar responden benar-benar tepat sasaran.
- 2) Senantiasa melakukan perbaikan kualitas layanan dan akan berkomitmen untuk tetap memberikan layanan terbaik dalam pelayanan maupun penyuluhan

- 3) Meningkatkan sarana maupun prasarana yang terkait dengan pelayanan dan penyuluhan agar pelayanan dan penyuluhan yang dilakukan leboh optimal.

## 8. Persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
<b>Realisasi</b>	120%	108,26%	108,26%	107,38%	107,38%	109,91%	109,91%
<b>Capaian</b>	120%	120%	120%	119,31%	119,31%	120%	120%

- 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- 2) Deskripsi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- 3) Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $\left( \text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\% \right) +$ $\left( \text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right)$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $\left( \left( \text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\% \right) + \left( \text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\% \right) \right) \times 40\% +$ $\left( \text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right)$

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
<b>Persentase Pengawasan Pembayaran Masa</b>	88,14%	118,69%	117,37%	109,91%

- c. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- 2) Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- 3) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- 4) Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- 5) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- 6) Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- 7) Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.

8) Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak.

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif.

Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
- Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang tersedia. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan pengawasan pembayaran masa lebih efisien.
- 2) Terkait sumber daya berupa SDM, dengan melakukan memaksimalkan peran SDM yang tersedia dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- 3) Terkait sumber daya berupa anggaran, dengan melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- f. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
- Kinerja pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah:
- 1) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
  - 2) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- g. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem dll
- 1) Pendapatan dari pajak menjadi sumber anggaran untuk mendukung program kesehatan dan nutrisi, yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan gizi masyarakat.
  - 2) Pajak menjadi sumber pendanaan bagi proyek-proyek pemerintah yang bertujuan mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi kesenjangan gender.
- h. Rencana aksi ke depan
- 1) Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - 2) Menyusun kebijakan dan strategi pengawasan pembayaran masa serta petunjuk teknisnya, dalam kaitannya untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025;
  - 3) Melaksanakan Rapat untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian pengawasan pembayaran masa tahun 2025.

## 9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (6a-CP)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>89,67%</b>	<b>113,41%</b>	<b>113,41%</b>	<b>106,21%</b>	<b>106,21%</b>	<b>112,11%</b>	<b>112,11%</b>
<b>Capaian</b>	<b>89,67%</b>	<b>113,41%</b>	<b>113,41%</b>	<b>106,21%</b>	<b>106,21%</b>	<b>112,11%</b>	<b>112,11%</b>

### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

### 2) Definisi IKU

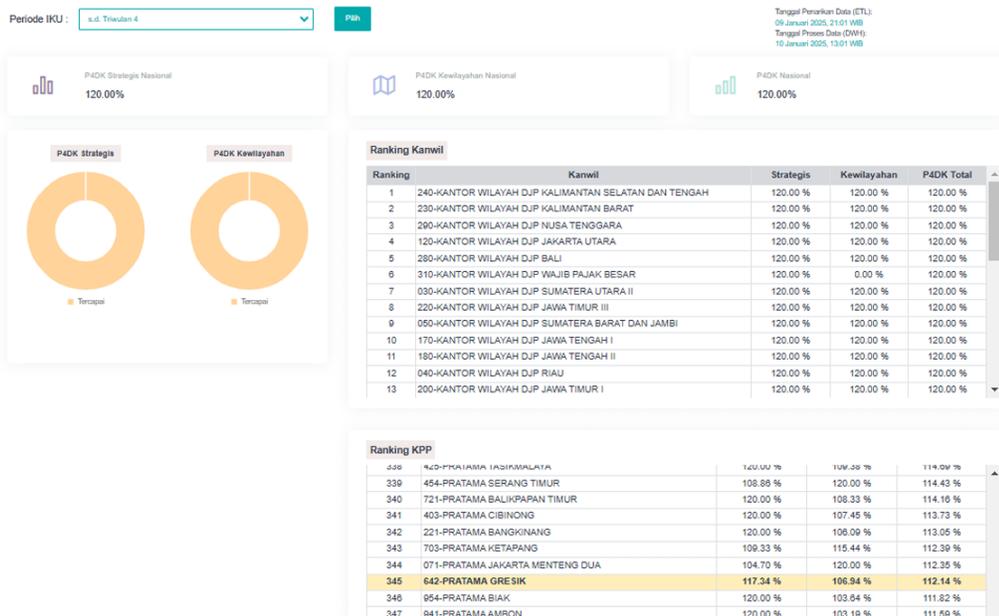
Permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- a) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- b) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

### 3) Formula IKU

<b>Formula:</b>		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya)
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

#### 4) Realisasi IKU



Sumber: Aplikasi Mandor-DJP data tanggal 10 Januari 2025, 13:01 WIB

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan penerimaan pajak tahun 2024 adalah 112,11% dengan Persentase penyelesaian

permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan wajib pajak strategis sebesar 117,34% dan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan wajib pajak lainnya (kewilayahan) sebesar 106,94%.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.

Nama IKU	Realisasi			
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	172,82%	120%	112,11%

Meskipun realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun ini lebih rendah.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau	100%	-	100%	112,11%

keterangan				
------------	--	--	--	--

d. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh untuk menunjang capaian kinerja tersebut, antara lain:

- 1) Melakukan *cleansing* data dan indentifikasi WP strategis yang baru dari kewilayahan;
- 2) Melakukan analisa data internal dan eksternal serta memasukkan WP yang potensial ke dalam DPP;
- 3) Menerbitkan LHPT dan SP2DK atas WP yang dimasukkan DPP;
- 4) Menindaklanjuti SP2DK dengan konseling dan pembuatan LHP2DK;
- 5) Melakukan identifikasi terhadap WP yang melaporkan SPT tidak sesuai dengan profil usahanya;
- 6) Memanfaatkan Data LHA dari Kanwil, analisa DER, Faktur 000, Data Apportal, Data CRM, Data Pemicu, dan Data Penguji;

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, antara lain:

- 1) melakukan komunikasi yang bersifat informal, sehingga Wajib Pajak merasa nyaman ketika konseling
- 2) menyisipkan materi edukasi kepada Wajib Pajak pada saat konseling sehingga Wajib Pajak

Meskipun target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Adanya mutasi nasional maupun regional *Account Representative*;
- 2) Pertumbuhan target PKM.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kunjungan ke Wajib Pajak dalam area atau wilayah kerja yang sama;
- 2) Pembayaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan jarak ke lokasi Wajib Pajak.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Optimalisasi Peran Komite Kepatuhan;
- 2) Bedah WP;
- 3) *Pairing Account Representative* dan FPP.

h. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan antara lain:

- 1) Risiko Wajib Pajak tidak menjalankan atau terlambat dalam melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakan yang telah disampaikan himbauan dimitigasi dengan Peningkatan skill dan kompetensi Kasi Pengawasan dan AR melalui IHT atau FGD serta Kolaborasi dengan PPNS.
- 2) Risiko penyelesaian SP2DK melebihi batas waktu yang telah ditentukan Monitoring secara berkala terkait penyelesaian SP2DK. apabila terdapat SP2DK yang akan segera jatuh tempo bisa segera ditindaklanjuti.

i. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Kendala yang dihadapi seperti Wajib Pajak tidak merespon SP2DK/ undangan konseling; terdapat beberapa data yang harus dilakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui pihak ketiga; pengawasan terhadap penyelesaian SP2DK perlu dimaksimalkan. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala adalah:

- 1) Melakukan *visit* dan pengamatan;
- 2) Melakukan kolaborasi dengan PPNS dan Penilai Kanwil;
- 3) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti Pemda.

- j. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan *ekstrem* dll

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan berperan penting dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian permintaan penjelasan atas data memungkinkan pengambil kebijakan memiliki landasan yang kuat dalam menyusun strategi berbasis bukti.

Dalam isu perubahan iklim, ketersediaan data yang akurat mendukung evaluasi efektivitas kebijakan mitigasi serta kesiapan adaptasi terhadap dampak lingkungan. Dalam pencegahan *stunting*, pemenuhan permintaan data memastikan intervensi gizi dan kesehatan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Sementara itu, dalam aspek kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan ekstrem, data yang akurat dan cepat diproses menjadi dasar dalam merancang program yang inklusif serta berbasis kebutuhan nyata di masyarakat.

- k. Rencana aksi ke depan

- 1) Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- 2) Peningkatan skill dan kompetensi Kepala Seksi Pengawasan dan *Account Representative* melalui IHT atau FGD;

- 3) Melakukan kegiatan kolaborasi dengan Kanwil (Fungsional Pemeriksa Pajak, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Fungsional Penilai) untuk mendorong Wajib Pajak membayar komitmennya;
- 4) Meningkatkan kegiatan pengumpulan data untuk mendukung kualitas SP2DK.

## 10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (6b-N)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sem 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	116.90%	117.30%	117.30%	118.01%	118.01%	119.70%	119.70%
<b>Capaian</b>	116.90%	117.30%	117.30%	118.01%	118.01%	119.70%	119.70%

### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

### 2) Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

#### a) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

#### b) Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak);

- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa).

### 3) Formula IKU

Formula
<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
<b>Pemanfaatan Data STP :</b>
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

#### 4) Realisasi IKU

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP				Pemanfaatan Data Matching				Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target	Realisasi	Persentase STP %	Target	Realisasi	Persentase Data Matching %	Persentase Data Matching %		
216 - KANTOR WILAYAH DUP JAWA TIMUR 6	25.776	31.165	120,90%	15.782	15.579	100,00%	119,70%		
643 - PRATAMA GRESIK	2.517	3.025	120,20%	1.328	1.620	120,00%	119,70%		

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik sebesar 119,70% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% dengan indeks capaian 119,70%.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	120%	119,70%

IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan baru ada di tahun 2023 dan mencapai realisasi maksimal yaitu sebesar 120%. Terdapat sedikit penurunan sebesar 0,3% pada realisasi tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan fokus strategi pengawasan atau tantangan dalam memanfaatkan data secara optimal di tengah dinamika wajib pajak dan sektor ekonomi yang terus berkembang.

- c. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mencapai target Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan, KPP Pratama Gresik melakukan berbagai upaya ekstra yang berfokus pada optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data historis sebagai alat pengawasan. Langkah-langkah

konkret yang diambil antara lain adalah penerbitan STP atas daftar nominatif STP (dafnom STP) dari tahun sebelumnya, serta identifikasi wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT tidak sesuai dengan profil usaha mereka.

KPP Pratama Gresik juga melakukan visit dan pengamatan lapangan guna memperkuat pengawasan berbasis risiko. Selain itu, dilakukan analisis dan penggalian potensi atas data pemicu dari tahun-tahun sebelumnya, dengan memasukkan WP potensial ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP). Langkah ini dilanjutkan dengan penerbitan LHPT dan SP2DK terhadap WP yang telah dimasukkan ke dalam DPP, serta melakukan imbauan kepada WP untuk melakukan pembetulan SPT mereka guna menyalurkan pelaporan dengan data yang ada.

Dengan memanfaatkan teknologi seperti Sistem Informasi DJP (SIDJP) dan aplikasi pendukung lainnya, KPP Pratama Gresik berhasil mengintegrasikan analisis data dan tindakan pengawasan yang terstruktur. Upaya ini tidak hanya membantu KPP melampaui target yang ditetapkan tetapi juga mencerminkan pendekatan yang proaktif dan sistematis dalam memaksimalkan potensi penerimaan dari data selain tahun berjalan.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan KPP Pratama Gresik dalam mencapai Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan yang konsisten tinggi didukung oleh sinergi dan kolaborasi yang berkesinambungan antara kegiatan pengawasan dan analisa atas informasi, data, serta laporan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Proses ini memastikan bahwa setiap data historis yang tersedia dapat diolah secara efektif untuk mendukung pengawasan dan penggalian potensi penerimaan pajak.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan di KPP Pratama Gresik terlihat dari pemanfaatan teknologi dan sistem informasi secara optimal. Sistem Informasi DJP (SIDJP) dan Approweb menjadi alat utama yang mendukung pengolahan data historis secara efektif, sehingga proses pengawasan dan analisis dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan KPP untuk memaksimalkan sumber daya yang ada tanpa perlu menambah beban operasional yang signifikan.

Secara keseluruhan, KPP Pratama Gresik telah menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya, baik manusia maupun teknologi, dapat dioptimalkan untuk mendukung kinerja. Ke depannya, upaya ini perlu diperkuat dengan pelatihan SDM dan pembaruan teknologi agar pengelolaan data semakin andal dan mampu mendukung pencapaian target secara berkelanjutan.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan KPP Pratama Gresik dalam mencapai Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung kinerja. Salah satunya adalah koordinasi intensif dengan Kantor Wilayah, yang mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan strategi pengawasan. Melalui koordinasi ini, KPP dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan kebijakan dan arahan yang berlaku, serta mendapatkan solusi yang cepat untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

- g. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan, KPP Pratama Gresik telah menyusun dan melaksanakan berbagai rencana aksi yang strategis. Pelaksanaan rencana aksi ini senantiasa diikuti dengan monitoring dan evaluasi berkala, yang bertujuan untuk memastikan efektivitas setiap langkah yang diambil serta mengantisipasi risiko tidak tercapainya target. Proses evaluasi ini memungkinkan identifikasi dini atas hambatan yang muncul, sehingga langkah-langkah mitigasi risiko dapat segera diterapkan.

- h. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Dalam upaya pencapaian Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan, KPP Pratama Gresik berkomitmen untuk memastikan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang inklusif sesuai dengan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Gresik memastikan bahwa layanan yang diberikan, termasuk

dalam pengawasan dan penggalian potensi data historis, dapat diakses oleh seluruh wajib pajak tanpa diskriminasi.

Untuk mendukung hal tersebut, KPP berupaya menyediakan data terpilah berdasarkan *gender* serta memastikan fasilitas yang mendukung wajib pajak dengan kebutuhan khusus. Keterlibatan aktif wajib pajak dalam proses pembetulan dan pelaporan SPT juga menjadi bagian dari strategi partisipatif yang dijalankan KPP. Upaya ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang merata, tidak hanya dalam bentuk kepatuhan pajak tetapi juga peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan perpajakan.

Ke depannya, KPP Pratama Gresik perlu terus meningkatkan inklusivitas, misalnya dengan menambahkan program khusus edukasi perpajakan untuk kelompok masyarakat tertentu, sehingga pencapaian kinerja tidak hanya berdampak pada target, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

- i. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan *ekstrem* dll

Pencapaian Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan di KPP Pratama Gresik turut mendukung upaya pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan nasional, termasuk dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, serta pengentasan kemiskinan *ekstrem*. Melalui pemanfaatan data historis yang lebih efektif, KPP dapat mengidentifikasi potensi wajib pajak dari sektor-sektor yang berhubungan dengan isu-isu tersebut. Misalnya, sektor industri yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan atau sektor kesehatan yang mendukung program pencegahan *stunting*.

Selain itu, dengan memastikan pemanfaatan data yang inklusif dan adil, KPP Pratama Gresik berperan dalam mendukung kesetaraan *gender* dan pengurangan kemiskinan *ekstrem* melalui pengawasan yang lebih tepat sasaran dan menyasar kelompok yang lebih rentan. Data yang diperoleh juga dapat digunakan untuk merancang kebijakan perpajakan yang mendukung sektor-sektor yang berperan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja terkait pemanfaatan data selain tahun berjalan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendukung tujuan-tujuan besar pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

j. Rencana aksi ke depan

Salah satu langkah utama adalah meningkatkan jumlah wajib pajak (WP) yang memiliki data pemacu dan penguji selain tahun berjalan, yang akan dianalisis untuk menggali potensi penerimaan lebih lanjut. Proses ini melibatkan penerbitan STP atas data selain tahun berjalan, serta melakukan analisa mendalam dan penggalan potensi atas data tersebut. WP yang dianggap potensial kemudian akan dimasukkan ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP). Selanjutnya, akan diterbitkan LHPT dan SP2DK bagi WP yang telah dimasukkan dalam DPP dan melakukan imbauan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT apabila ditemukan ketidaksesuaian. Untuk memastikan pemanfaatan data yang lebih optimal, KPP Pratama Gresik juga akan memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah serta Seksi Penjaminan Kualitas Data dalam memilah data berkualitas yang dapat digunakan untuk pengawasan dan analisis lebih lanjut.

Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pemanfaatan data selain tahun berjalan, serta memperkuat upaya KPP Pratama Gresik dalam mencapai target penerimaan pajak secara lebih efektif dan efisien.

## 11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sem 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	101,88%	116,66%	116,66%
Capaian	120%	120%	120%	120%	101,88%	116,66%	116,66%

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

2) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

### 3) Formula IKU

<b>Formula:</b>
<b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b> = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
<b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b> = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
<b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b> = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
<b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b> = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

### 4) Realisasi IKU

NO	KODE_IKU	KODE_KANWIL	KODE_UNI	NAMA_KANWIL	NAMA_KPP	ONEN 2 (BOBOT 40%)				KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
						NGSI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
221	06c-N	210	603	KANTOR WIL	PRATAMA SIDOARJO BARAT	96.20%	87.14%	80.00%	108.92%	359.39%	55.00%	120.00%	115.57%
227	06c-N	210	608	KANTOR WIL	PRATAMA PAMEKASAN	96.78%	91.78%	80.00%	114.72%	207.09%	55.00%	120.00%	117.89%
226	06c-N	210	617	KANTOR WIL	PRATAMA SIDOARJO SELATAN	99.28%	94.87%	80.00%	118.59%	100.00%	55.00%	120.00%	119.43%
215	06c-N	210	621	KANTOR WIL	PRATAMA MADIUN	96.06%	87.73%	80.00%	109.66%	41.22%	55.00%	120.00%	102.35%
213	06c-N	210	636	KANTOR WIL	MADYA GRESIK	102.26%	91.65%	80.00%	114.56%	38.02%	55.00%	120.00%	102.56%
214	06c-N	210	641	KANTOR WIL	MADYA SIDOARJO	105.92%	99.67%	80.00%	120.00%	72.03%	55.00%	120.00%	120.00%
228	06c-N	210	642	KANTOR WIL	PRATAMA GRESIK	96.36%	89.32%	80.00%	111.65%	117.54%	55.00%	120.00%	116.66%
216	06c-N	210	643	KANTOR WIL	PRATAMA SIDOARJO UTARA	102.44%	96.07%	80.00%	120.00%	339.48%	55.00%	120.00%	120.00%
218	06c-N	210	644	KANTOR WIL	PRATAMA BANGKALAN	85.66%	77.79%	80.00%	97.23%	106.83%	55.00%	120.00%	110.89%
219	06c-N	210	645	KANTOR WIL	PRATAMA LAMONGAN	92.94%	99.09%	80.00%	120.00%	324.34%	55.00%	120.00%	120.00%
220	06c-N	210	646	KANTOR WIL	PRATAMA NGAWI	93.98%	96.42%	80.00%	120.00%	73.00%	55.00%	120.00%	120.00%
222	06c-N	210	647	KANTOR WIL	PRATAMA PONOROGO	85.19%	75.81%	80.00%	94.76%	550.20%	55.00%	120.00%	109.91%

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
<b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b>	-	-	-	116,66%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N) merupakan IKU baru yang muncul pada tahun 2024 sehingga tidak ditemukan data pembandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, KPP Pratama Gresik

berkomitmen akan terus memaksimalkan angka capaian realisasi di tahun yang akan datang.

c. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

1) **Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Efektif** : Melakukan koordinasi dengan seksi terkait dalam pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak, melaksanakan rapat komite kepatuhan secara berkala, serta menetapkan DSP4 melalui komite kepatuhan;

2) **Pemantauan dan Evaluasi Secara Rutin**: Sebagai sekretariat, Seksi PKD juga secara proaktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Komite Kepatuhan kewajib Wajib Pajak di KPP Pratama Gresik guna memastikan pelaksanaan DSP4 berjalan pada setiap subtim.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) di KPP Pratama Gresik memegang peran strategis dalam mendorong peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, analisis efisiensi penggunaan sumber daya menjadi kunci penting. Sumber daya yang dimaksud meliputi tenaga kerja, teknologi informasi, dan anggaran operasional.

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dapat dilihat dari optimalisasi jadwal rapat komite, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan kepatuhan wajib pajak secara digital, serta alokasi anggaran yang tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, pengelolaan KKWP tidak hanya mengurangi pemborosan tetapi juga mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya.

Efektivitas KKWP tercermin dari ketepatan waktu dalam menyelesaikan evaluasi kepatuhan, penyampaian rekomendasi yang komprehensif kepada manajemen, dan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Gresik. Kombinasi antara efisiensi sumber daya dan strategi pengelolaan yang terstruktur menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa komite dapat beroperasi secara tepat waktu, mendukung pencapaian target penerimaan pajak, dan menjaga kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan.

- e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dalam pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) di KPP Pratama Gresik sangat dipengaruhi oleh efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Beberapa program utama yang menunjang keberhasilan mencakup optimalisasi sistem pemantauan kepatuhan berbasis digital, penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala, dan pelaksanaan edukasi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan.

Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan KKWP bergantung pada sinergi antara perencanaan program yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, dan mekanisme evaluasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, perbaikan terhadap kegiatan yang kurang efektif dan penguatan terhadap program yang berhasil perlu dilakukan secara sistematis untuk mendukung pengelolaan KKWP yang lebih tepat waktu dan efisien.

- f. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Implementasi rencana aksi ini melibatkan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kompetensi tim melalui pelatihan, penguatan infrastruktur teknologi, dan pengembangan komunikasi yang efektif antarunit kerja. Mitigasi risiko juga dilakukan dengan membangun sistem monitoring yang terintegrasi untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif secara cepat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana aksi sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan dan komitmen seluruh pihak terkait. Ketidaktepatan atau kelalaian dalam menjalankan mitigasi risiko dapat menghambat efektivitas pengelolaan KKWP, seperti tertundanya penyelesaian evaluasi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, evaluasi berkelanjutan, dan penyesuaian strategi secara dinamis diperlukan untuk memastikan rencana aksi mampu mendukung pengelolaan KKWP yang efektif dan tepat waktu.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Dari segi akses, KKWP memastikan layanan perpajakan tersedia untuk semua pihak tanpa diskriminasi. Hal ini dilakukan melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas, seperti jalur khusus dan layanan berbasis digital yang mudah diakses. Kontrol terhadap pengelolaan KKWP melibatkan pengambilan keputusan yang inklusif, memastikan partisipasi perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus dalam diskusi kebijakan.

Untuk partisipasi, KKWP aktif mengadakan program edukasi dan sosialisasi yang menjangkau seluruh wajib pajak, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses fisik maupun sosial. Data terpilah berdasarkan *gender* dan kondisi khusus digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik wajib pajak dan meningkatkan efektivitas layanan.

Manfaat pencapaian IKU melalui pendekatan GEDSI terlihat pada peningkatan kepuasan wajib pajak, pengurangan hambatan dalam akses layanan, serta tercapainya target kepatuhan pajak secara lebih merata. Dengan menerapkan prinsip GEDSI, KKWP tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan tetapi juga membangun kepercayaan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan *ekstrem* dll.

Dalam konteks perubahan iklim, optimalisasi penerimaan pajak melalui KKWP mendukung pendanaan program pemerintah terkait mitigasi, seperti insentif pajak untuk energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pencegahan *stunting* difasilitasi melalui alokasi anggaran negara yang lebih efektif, yang salah satunya berasal dari peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak di wilayah Gresik.

Pada isu kesetaraan *gender*, KKWP memastikan pendekatan layanan yang inklusif dengan melibatkan perempuan dalam program edukasi perpajakan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan. Selain itu, dalam mendukung pengentasan kemiskinan *ekstrem*, KKWP berperan tidak langsung melalui peningkatan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk program kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.

- i. Rencana aksi ke depan

- 1) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antaranggota komite;
- 2) Mengimplementasikan platform komunikasi internal untuk mempermudah koordinasi komite;

- 3) Menyusun jadwal kerja komite yang lebih terstruktur untuk memastikan tugas selesai tepat waktu;
- 4) Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan tugas komite.

## 12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (7a-CP)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Berikut disajikan target, realisasi, dan capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian KPP Pratama Gresik selama tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Sem 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	118,87%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
<b>Capaian</b>	118,87%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

- 2) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- 3) Formula IKU

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%) Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.

Dari tahun 2021 hingga 2023, IKU yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan penilaian dinamakan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Namun, pada tahun 2024, IKU Efektivitas Pemeriksaan berganti nama menjadi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Variabel dalam IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dari tahun ke tahun pun tak luput dari adanya perubahan. Meskipun variabel dalam IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian berubah setiap tahunnya, konsistensi KPP Pratama Gresik dalam mencapai 120% menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Gresik memiliki kinerja yang sangat baik dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan dan penilaian, dengan capaian yang melebihi target yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi dan capaian IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian KPP Pratama Gresik dari tahun 2021 hingga 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

T/R	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	80%	80%	80%	100%
<b>Realisasi</b>	119,53%	119,53%	109,77%	120%
<b>Capaian</b>	120%	120%	120%	120%

- c. Upaya Extra Effort dalam Mencapai Target Kinerja

Dalam mencapai target kinerja pemeriksaan dan penilaian yang maksimal, KPP Pratama Gresik memiliki upaya extra effort sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyusunan Game Plan pemeriksaan sehingga dapat diketahui kebutuhan bahan baku pemeriksaan;
- 2) Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan;
- 3) Melakukan analisis terhadap potensi dan kemampuan membayar Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan, sehingga tercipta pemeriksaan yang berkualitas;

- 4) Melakukan koordinasi dengan kantor pusat terkait data emisi materai;
- 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam memperoleh data Izin Usaha Pertambangan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Keberhasilan KPP Pratama Gresik dalam meningkatkan kinerja pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari adanya koordinasi yang baik antar aktor. Aktor dalam hal ini ialah Komite Kepatuhan, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai, Account Representative, dan Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai juga melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, seperti Kantor Wilayah, Kantor Pusat, dan Kementrian/Lembaga lain untuk mendapatkan data pendukung dalam rangka pemeriksaan atau penilaian.

Hal lain yang menjadi faktor keberhasilan KPP Pratama Gresik dalam meningkatkan kinerja pemeriksaan dan penilaian adalah adanya monitoring kinerja yang baik. Dengan adanya monitoring kinerja, maka setiap aktor dapat mengetahui dan mengukur kinerja masing-masing aktor. Hal tersebut dapat memotivasi aktor untuk meningkatkan kinerjanya.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mencapai kinerja maksimal, KPP Pratama Gresik menggunakan 3 aspek sumber daya utama yaitu sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi. Penggunaan SDM yang terampil dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya akan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan dan pengawasan pajak. Pelatihan yang berkala, pengembangan kompetensi, serta pemanfaatan keahlian masing-masing pegawai harus diperhatikan untuk mencapai kinerja yang optimal. Efisiensi dalam pembagian tugas dan tanggung jawab sangat penting. Pembagian tugas yang merata antar pegawai dapat mengurangi beban kerja yang berlebihan pada beberapa pegawai, serta meningkatkan kinerja keseluruhan. Selain itu keberadaan fasilitas pendukung seperti komputer, perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai sangat penting untuk mendukung kinerja KPP. Penggunaan sistem informasi yang telah terintegrasi memberi kemudahan dalam memperoleh data. Sistem yang saling terhubung akan meningkatkan efisiensi proses administrasi dan pengawasan pajak.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan KPP Pratama Gresik dalam mencapai kinerja yang maksimal dalam pemeriksaan dan penilaian adalah sebagai berikut :

- 1) Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) yang didalamnya mencakup Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn)
- 2) Kanwil DJP Jawa Timur II memberikan target kepada Fungsional Pemeriksa Pajak untuk membuat 2 Kertas Kerja Analisis (KKA) per triwulan sebagai pemenuhan bahan baku pemeriksaan
- 3) Permintaan data emisi materai kepada Kantor Pusat DJP
- 4) Permintaan data Izin Usaha Pertambangan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

g. Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

- 1) Identifikasi risiko dalam efektivitas pemeriksaan adalah nilai SKP terbit tahun berjalan tidak sesuai dengan data usulan potensi DSPP. Hal ini disebabkan oleh tahun pajak yang diusulkan di DSPP mendekati daluarsa penetapan, dasar/metode penghitungan data potensi pada DSPP yang disetujui oleh Komite Kepatuhan kurang tepat, dan kekurangan bahan baku pemeriksaan.
- 2) Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun untuk memperkecil kemungkinan risiko tersebut adalah penetapan usulan DSPP agar memperhatikan daluarsa penetapan, pencarian dan penyusunan bahan baku Pemeriksaan secara mandiri, dan penyusunan bahan paparan dan pemaparan dasar penghitungan data potensi DSPP dan manajemen waktu dalam rapat Komite Kepatuhan untuk dilakukan evaluasi
- 3) Identifikasi risiko dalam efektivitas penilaian adalah kegiatan penilaian tidak menghasilkan nilai hasil penilaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai menurut Wajib Pajak atau NJOP tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh data yang tersedia/digunakan untuk penilaian tidak memadai dan terdapat data CRM Penilaian yang tidak menangkap isu Penilaian.
- 4) Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun untuk memperkecil kemungkinan risiko tersebut adalah Pembahasan terkait kepastian aspek perpajakan dan

kewenangan penilaian pada saat bedah WP dan/atau pembahasan permintaan bantuan penilaian dan pengusulan penyediaan data pendukung penilaian kepada wali data perpajakan.

- h. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

Selama tahun 2024 komposisi Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Gresik terdiri dari 15 pegawai lelaki dan 1 pegawai perempuan. Sedangkan komposisi Fungsional Penilai di KPP Pratama Gresik terdiri atas 1 pegawai lelaki.

KPP Pratama Gresik memberikan akses informasi pendukung prosedur pemeriksaan maupun penilaian yang sama terhadap setiap Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai. Setiap Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai memiliki kontrol yang mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi atau mengendalikan keputusan yang diambil dalam layanan pemeriksaan dan penilaian pajak. Fungsional Pemeriksa Pajak perempuan memiliki partisipasi yang sama besar dengan Fungsional Pemeriksa Pajak laki-laki dalam pencapaian kinerja. Manfaat yang diberikan antara pegawai laki-laki dan perempuan pun sama atas tercapainya kinerja pemeriksaan dan penilaian. Hal ini menunjukkan KPP Pratama Gresik memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* dalam peningkatan kinerja.

- i. Analisis dukungan IKU terhadap pemerintah

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian memberikan dukungan penuh terhadap sistem kesetaraan gender. Pegawai laki-laki dan perempuan memiliki peran dan partisipasi yang sama besar terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi. Manfaat yang diterima antara pegawai laki-laki dan perempuan atas tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian adalah sama. Setiap pegawai juga memiliki kesempatan yang sama untuk meraih jenjang karir yang tersedia.

- j. Rencana Aksi ke Depan

Rencana aksi yang akan dilakukan KPP Pratama Gresik dalam meningkatkan kinerja pemeriksaan dan penilaian adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Rapat Komite Kepatuhan untuk membahas usulan DSPP terkait *Post Audit*;

- 2) Penetapan usulan DSPP yang memperhatikan nilai potensi, kemampuan membayar, eksistensi Wajib Pajak, dan deluwarisa penetapan;
- 3) Peningkatan kompetensi Fungsional Pemeriksa Pajak berbasis tematik proses bisnis Wajib Pajak;
- 4) Peningkatan kompetensi FPP melalui pelatihan penyusunan kertas kerja analisis;
- 5) Bimbingan teknis, sosialisasi, dan atau FGD terkait pembentukan DSPPn berkualitas;
- 6) Pembahasan terkait kepastian aspek perpajakan dan kewenangan penilaian pada saat bedah WP dan/atau pembahasan permintaan bantuan penilaian.

### 13. Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
<b>Realisasi</b>	42,47%	80,13%	80,13%	97,10%	97,10%	116,20%	116,20%
<b>Capaian</b>	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- 2) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- a) Variabel tindakan penagihan (50%);

- b) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- c) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

### 3) Formula IKU

<b>Formula:</b>	
<b>(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +</b>	
<b>1. Formula Variabel Tindakan Penagihan</b>	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
<b>2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC</b>	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
<b>2. Formula Variabel Pencairan DSPC</b>	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

#### Variabel Tindakan Penagihan

Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	%Realisasi	Max 120%	%Bobot	Realisasi X Bobot
Surat Teguran	2,412	7,125	295.40%	120.00%	19%	22.80%
Surat Paksa	2,038	2,665	130.77%	120.00%	29%	34.80%
Penyitaan	54	113	209.26%	120.00%	8%	9.60%
Blokir	30	97	323.33%	120.00%	28%	33.60%
Penjualan Barang Sitaan	8	28	350.00%	120.00%	16%	19.20%
Total						120.00%

#### Variabel Tindak Lanjut DSPC

JML WP DSPC	Target TL	SITA	PBS	CEGAH	BAYAR MINIMAL	LUNAS 2024	REALISASI TL	% TL	% TL (Max 120%)	%TL x Bobot 20%
100	50	18	14	0	49	9	55	110.00%	110.00%	22.00%

#### Variabel Pencairan DSPC

TARGET PENCAIRAN	REALISASI PENCAIRAN	% PENCAIRAN DSPC	MAKS 120%	BOBOT VARIABEL III (30%)
12,675,960,000	14,448,767,121	113.99%	113.99%	34.20%

### Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	120.00%	50.00%	60.00%
Variabel tindak lanjut DSPC	110.00%	20.00%	22.00%
Variabel pencairan DSPC	113.99%	30.00%	34.20%
Total			116.20%
Indeks Capaian IKU = (80% / 75%) x 100%			154.93%
<b>Maksimal 120%</b>			120.00%

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.

Pada tahun 2021 dan 2022, variabel yang diperhitungkan pada formula Tingkat Efektivitas Penagihan hanya Tindakan Penagihan yang meliputi Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan, Pencegahan IKU. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terdapat 3 variabel yang diperhitungkan dalam formula IKU Tingkat Efektivitas Penagihan yang meliputi Variabel Tindakan Penagihan, Variabel Tindak Lanjut DSPC, dan Variabel Pencairan DSPC. Meskipun variabel dalam IKU Tingkat Efektivitas Penagihan berubah, konsistensi KPP Pratama Gresik dalam mencapai 120% selalu bisa dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Gresik memiliki kinerja yang sangat baik dalam menjalankan kegiatan Penagihan, dengan capaian yang melebihi target yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi dan capaian IKU Efektivitas Penagihan dan Penilaian KPP Pratama Gresik dari tahun 2021 hingga 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
<b>Tingkat Efektivitas Penagihan</b>	105,83%	111,44%	112,06%	116,2%

- c. Analisis Upaya-Upaya Ekstra Effort yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

- 1) Melakukan upaya persuasif kepada para penunggak pajak, menerbitkan Surat Teguran dan Menyampaikan Surat Paksa;
- 2) Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat/APH/instansi lain untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan;
- 3) Pelaksanaan asset tracing secara mendalam untuk mengetahui kemampuan bayar dari wajib pajak sebelum melakukan penyitaan/pencegahan/pemblokiran;
- 4) Pelaksanaan identifikasi penunggak pajak yang dapat diusulkan pencegahan dan meminta KPP untuk mengusulkan pencegahan dan perpanjangan pencegahan;
- 5) Pelaksanaan Gelar Perkara Pencegahan untuk menentukan kelayakan usul pencegahan terhadap penunggak pajak;
- 6) Kerja sama dengan Pihak Perbankan termasuk dengan kantor cabang di daerah dalam pelaksanaan penagihan aktif.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Keberhasilan KPP Pratama Gresik dalam meningkatkan kinerja Penagihan merupakan hasil dari adanya koordinasi yang baik antar Aktor. Aktor dalam hal ini ialah Pihak Internal KPP Pratama Gresik dan Pihak Eksternal (Wajib Pajak, instansi pemerintah daerah, dan instansi lainnya) dalam bersinergi untuk optimalisasi pelaksanaan penagihan pajak. Dalam melaksanakan tugasnya Juru sita selalu melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah daerah dalam menghimpin data dan identitas Penanggung Pajak serta bekerja sama dalam penyampaian Surat Paksa. Juru Sita juga bekerja sama dengan Instansi Bank dalam pelaksanaan Pemblokiran. Sinergi yang sudah dibangun dengan pihak eksternal ini menjadi faktor keberhasilan dalam optimalisasi kinerja penagihan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penagihan juga selalu dilakukan yang melibatkan Kanwil DJP Jawa Timur II. Kanwil DJP Jawa Timur II selalu mengirimkan data kinerja penagihan setiap bulan kepada KPP Pratama Gresik yang bisa dijadikan bahan evaluasi dan monitoring sehingga untuk menjaga kinerja pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Gresik

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mencapai kinerja maksimal, KPP Pratama Gresik menggunakan 3 aspek sumber daya utama yaitu sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi. Penggunaan SDM yang terampil dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan

tugas dan tanggung jawabnya akan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan dan pengawasan pajak. Pelatihan yang berkala, pengembangan kompetensi, serta pemanfaatan keahlian masing-masing pegawai harus diperhatikan untuk mencapai kinerja yang optimal. Efisiensi dalam pembagian tugas dan tanggung jawab sangat penting. Pembagian tugas yang merata antar pegawai dapat mengurangi beban kerja yang berlebihan pada beberapa pegawai, serta meningkatkan kinerja keseluruhan. Selain itu keberadaan fasilitas pendukung seperti komputer, perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai sangat penting untuk mendukung kinerja KPP. Penggunaan sistem informasi yang telah terintegrasi memberi kemudahan dalam memperoleh data. Sistem yang saling terhubung akan meningkatkan efisiensi proses administrasi dan pengawasan pajak.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan KPP Pratama Gresik dalam mencapai kinerja yang maksimal dalam penagihan adalah sebagai berikut :

- 1) Monitoring dan Evaluasi setiap bulan terhadap kinerja Penagihan Pajak yang melibatkan Kanwil DJP Jawa Timur II;
- 2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam penyampaian Surat Paksa;
- 3) Kerja Sama dengan Instansi Perbankan dalam pelaksanaan Pemblokiran;
- 4) Pelaksanaan Gelar Perkara Pencegahan untuk menentukan kelayakan usul pencegahan terhadap penunggak pajak;
- 5) Pelaksanaan asset tracing secara mendalam untuk mengetahui kemampuan bayar dari wajib pajak sebelum melakukan penyitaan/pencegahan/pemblokiran;
- 6) Pelaksanaan identifikasi penunggak pajak yang dapat diusulkan pencegahan dan meminta KPP untuk mengusulkan pencegahan dan perpanjangan pencegahan.

g. Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Identifikasi risiko dalam efektivitas penagihan adalah Tindak lanjut penagihan WP DSPC tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh Tindakan penagihan aktif tidak dilaksanakan dengan maksimal, Penentuan WP DSPC tidak tepat sasaran, Keberadaan

penanggung pajak tidak diketahui, dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pembayaran tagihan pajak.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun untuk memperkecil kemungkinan risiko tersebut adalah Pelaksanaan peningkatan kompetensi Jurusita Pajak secara berkala dengan narasumber ahli, Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat/APH/instansi lain untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, dan Pelaksanaan edukasi kepada WP terkait dengan proses penagihan.

h. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Selama tahun 2024 komposisi Tim Penagihan di KPP Pratama Gresik terdiri dari 2 Juru Sita lelaki dan 1 Pelaksana perempuan. KPP Pratama Gresik memberikan akses informasi pendukung prosedur penagihan yang sama terhadap Juru Sita maupun Pelaksana atau Petugas Penagihan. Setiap Juru Sita memiliki kontrol yang mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi atau mengendalikan keputusan yang diambil dalam layanan penagihan pajak. Pelaksana atau Petugas Penagihan (perempuan) memiliki partisipasi yang sama besar dengan Juru Sita (laki-laki) dalam pencapaian kinerja. Manfaat yang diberikan antara pegawai laki-laki dan perempuan pun sama atas tercapainya kinerja penagihan. Hal ini menunjukkan KPP Pratama Gresik memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dalam peningkatan kinerja.

i. Analisis dukungan IKU terhadap pemerintah

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan memberikan dukungan penuh terhadap sistem kesetaraan gender. Pegawai laki-laki dan perempuan memiliki peran dan partisipasi yang sama besar terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi. Manfaat yang diterima antara pegawai laki-laki dan perempuan atas tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah sama. Setiap pegawai juga memiliki kesempatan yang sama untuk meraih jenjang karir yang tersedia.

j. Rencana Aksi ke Depan

Rencana aksi yang akan dilakukan KPP Pratama Gresik dalam meningkatkan kinerja penagihan adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan peningkatan kompetensi Jurusita Pajak secara berkala;

- 2) Pelaksanaana peningkatan kompetensi untuk Jurusita berbasis tematik proses pencegahan Penunggak Pajak;
- 3) Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat/APH/instansi lain untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan;
- 4) Pelaksanaan edukasi Wajib Pajak terkait proses penagihan;
- 5) Pelaksanaan pertemuan secara berkala setiap tahunnya dengan Pihak Perbankan termasuk dengan kantor cabang di daerah untuk bekerja sama dalam pelaksanaan penagihan aktif;
- 6) Pelaksanaan *asset tracing* lebih mendalam untuk mengetahui kemampuan bayar dari wajib pajak sebelum melakukan penyitaan/pencegahan/pemblokiran.

#### 14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (7c-N)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	0%	0%	0%	300%	300%	200%	200%
<b>Capaian</b>	0%	0%	0%	120%	120%	120%	120%

- 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

- 2) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP.

Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

### 3) Formula IKU

<b>Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah</b>	<b>x</b>
<b>Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah</b>	<b>100%</b>

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	200%

IKU Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan merupakan IKU yang baru ada di tahun 2024, sehingga tidak memiliki data historis untuk tahun-tahun sebelumnya.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II**  
JALAN RAYA JUANDA NO 37, SIDOARJO 61254  
 TELEPON (031) 8672483, 8672484, 8672486, FAKSIMILE (031) 8672262, LAMAN www.pajak.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRIMINAL PAJAK (021) 1500200  
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

---

NOTA DINAS  
NOMOR ND-4118/WPJ.24/2024

Yth. : Direktur Penegakan Hukum  
 Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : Satu berkas  
 Hal : Penyampaian Data Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024  
 Tanggal : 19 Desember 2024

---

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum nomor ND-5153/PJ.05/2024 hal Permintaan Data Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan data tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Agustin Vita Avantin

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi
12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban
13. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo
14. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang

DAFTAR USUL BUPER YANG DISETUJUI KANWIL									
KANWIL DJP JAWA TIMUR II									
TRIWULAN IV 2024									
No.	Nama Wajib Pajak (b)	NPWP (c)	Dasar Usul (Pemeriksaan/Pengawasan) (d)	No ND penyampaian usul (e)	Tanggal usul (f)	No BA Penelaahan (g)	Tanggal BA Penelaahan (h)	Unit kerja (contoh kpp AL) (i)	Catatan* (j)
5	PT BERKAH AGUNG SAMUDRA	02.096.808.3-612.000	Pengawasan	ND-718/KPP.2410/2024	31 Juli 2024	BA-22/USULBP/WPJ.244/2024	12 Agustus 2024	KPP Pratama Gresik	Diterima
10	PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA	03.101.626.4-612.001	Pengawasan	ND-887/KPP.2410/2024	18 September 2024	BA-35/USULBP/WPJ.244/2024	23 September 2024	KPP Pratama Gresik	Diterima

- c. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak untuk memastikan kepuasan dan kepercayaan dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan
  - 2) Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses Pemeriksaan Bukti Permulaan
  - 3) Peningkatan Komunikasi: Meningkatkan komunikasi antara petugas Pemeriksaan Bukti Permulaan, wajib pajak, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan keselarasan dan kepatuhan dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis terkait capaian IKU Capaian Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi seperti:

- 1) Terdapat kendala di nilai potensi. Ketika WP akan diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan ternyata nilai potensinya kecil, sehingga tidak memenuhi kriteria WP yang dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 2) Terdapat kendala di kondisi keuangan WP;
- 3) Terdapat kendala pada data valid nilai minim atau nilai besar namun perlu pengujian lebih lanjut atau kadang WP divisit tidak ditemukan dilokasi;
- 4) Keterbatasan akses ke informasi dan dokumen yang diperlukan;
- 5) Kurangnya kerja sama dari wajib pajak atau pihak terkait;
- 6) Keterbatasan waktu dan biaya untuk melakukan pemeriksaan;
- 7) Keterbatasan kemampuan komunikasi dan negosiasi

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala adalah:

- 1) Melakukan pembahasan kolaborasi dengan tim penyidik kanwil;
- 2) Terkait potensi harus valid, nominal juga sebaiknya yang material (besar), Wajib Pajak sudah dilakukan visit dan ditemukan;
- 3) Melakukan komunikasi yang efektif dengan wajib pajak untuk memastikan kerja sama yang baik;

- 4) Mengumpulkan data yang lengkap dan akurat untuk mendukung Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- 5) Menganalisis data dengan efektif untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau kecurangan

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator kinerja utama Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dianalisis melalui optimalisasi tenaga kerja, sistem kerja, serta pemanfaatan teknologi. Faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap efisiensi meliputi kecepatan identifikasi wajib pajak yang berpotensi dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, ketepatan dalam penyusunan usulan, serta dukungan sistem informasi yang mempercepat proses validasi dan pengambilan keputusan.

Jika sumber daya—termasuk SDM, anggaran, dan infrastruktur—dapat digunakan secara efektif, maka persentase penyampaian usul dapat meningkat dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat dan kualitas hasil yang lebih baik. Sebaliknya, kendala seperti keterbatasan personel terlatih, kompleksitas regulasi, serta infrastruktur yang belum optimal dapat menghambat pencapaian target kinerja. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dapat dilakukan melalui pelatihan SDM, penyederhanaan prosedur, dan integrasi sistem digital untuk mendukung proses penyampaian usul secara lebih cepat dan akurat.

f. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi dan strategi mitigasi risiko berperan penting dalam pencapaian Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Rencana aksi yang telah disusun mencakup langkah-langkah peningkatan efektivitas identifikasi kasus, percepatan proses administrasi, serta optimalisasi koordinasi antarunit terkait.

Dalam implementasinya, efektivitas rencana aksi bergantung pada komitmen pelaksana, dukungan teknologi, serta kapasitas sumber daya manusia. Risiko yang dapat menghambat pencapaian target antara lain keterlambatan pengumpulan data, kendala regulasi, serta keterbatasan personel yang kompeten. Untuk mengatasi hal ini, strategi

mitigasi risiko yang diterapkan meliputi penguatan sistem pemantauan, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, serta digitalisasi proses administrasi.

Evaluasi berkala atas pelaksanaan rencana aksi menjadi kunci dalam menilai efektivitas mitigasi risiko serta memastikan pencapaian target sesuai dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

g. Rencana aksi ke depan

- 1) Meningkatkan pengumpulan data dan informasi proses bisnis dari WP tertentu yang disasar melalui kegiatan pengamatan ke lokasi usaha WP;
- 2) Memanfaatkan daftar Wajib Pajak yang ada di CRM dengan rekomendasi treatment penegakan hukum;
- 3) Melakukan kolaborasi dengan PPNS dan Pemeriksa.

## 15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan (8a-CP)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sem 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	46,12%	72,12%	72,12%	74%	74%	120%	120%
<b>Capaian</b>	230,6%	144,24%	144,24%	92,5%	92,5%	120%	120%

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

2) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

a) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau

informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

b) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

3) Formula IKU

Formula
<b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
<b>2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b>
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

Realisasi IKU (narasi penjelasan atas capaian IKU pada tahun 2024)

a) Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Target kegiatan pengamatan tahun 2024 adalah sebanyak 4 laporan pengamatan. Sampai dengan triwulan ke-4, realisasi kegiatan pengamatan adalah sebanyak 7 laporan pengamatan atau 193% dengan nilai maksimal IKU sebesar 120 %. Berikut adalah data monitoring kegiatan pengamatan dari Kanwil DJP Jawa Timur II per tanggal 2 Januari 2025:

Data Monitoring Kegiatan Pengamatan oleh KPP					
Kanwil DJP Jawa Timur II					
Tahun 2024					
cut off - 02 Jan 2025					
No	Nama KPP	Target	Jumlah Laporan	Realisasi (Jumlah Laporan x Konstanta Waktu)	Prosentase (%)
a	b	c	d	d	e
1	KPP Pratama Jombang	4	9	9.9	248%
2	KPP Pratama Tuban	4	9	9.3	233%
3	KPP Pratama Lamongan	4	7	7.7	193%
4	KPP Pratama Gresik	4	7	7.7	193%
5	KPP Pratama Sidoarjo Utara	4	7	7.7	193%
6	KPP Pratama Pamekasan	4	7	7.7	193%
7	KPP Pratama Mojokerto	4	6	6.6	165%
8	KPP Madya Gresik	4	6	6.6	165%
9	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	4	6	6.6	165%
10	KPP Pratama Sidoarjo Barat	4	6	6.6	165%
11	KPP Pratama Bojonegoro	4	5	5.5	138%
12	KPP Pratama Ngawi	4	5	5.5	138%
13	KPP Pratama Ponorogo	4	5	5.5	138%
14	KPP Madya Sidoarjo	4	5	5.5	138%
15	KPP Pratama Madiun	4	5	5.5	138%
16	KPP Pratama Bangkalan	4	5	5.1	128%

b) Realisasi Penyediaan data potensi perpajakan

KPP Pratama Gresik mendapatkan target KPDL dan Alket tahun 2024 sebanyak 1348. Realisasi atas target tersebut adalah sebanyak 2.057, namun penghitungan atas IKU didasarkan pada realisasi tepat waktu sebanyak 1.949. Capaian IKU adalah 144,58% dengan nilai maksimal IKU sebesar 120%

Dashboard KPDL Dan Alket 2024

Dashboard KPDL SE-11 Alket SE-12 Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Per Unit Kerja

Semua Semua Januari Desember Pilih

Data update terakhir: 07-01-2025 14:13:15 WIB

Unit Kerja	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Perbaikan	Materai	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Tertambat	SP2DKIE	LHP2DKIE	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
a	b	c	d	e	f	g	h+g+hg	i	j	k	l+hk	m	n	o	p	q	r+hq	s	t+h
210 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	26.158	20.979	540	233	33	4	270	606	19.973	5.909	25.282	24.233	352	2.353	1.814	15.440	156,95%	100%	120,00%
842 - PRATAMA GRESIK	2.076	1.934	17	6	0	0	6	13	1.661	386	2.057	1.949	43	119	103	1.348	144,58%	100%	120,00%

Sumber: aplikasi mandor

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah IKU baru dihitung mulai tahun 2023. Berikut perbandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyediaan data dan potensi perpajakan	120%	120%	113,15%	100,01%

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan capaian realisasi tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh membaiknya capaian komponen realisasi laporan pengamatan ditahun 2024 yang mencapai nilai maksimal atau 120%. Selain itu, capaian yang maksimal tersebut diraih berkat pemahaman yang lebih baik terhadap capaian dan realisasi sesuai manual IKU.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian komponen penyediaan data potensi perpajakan selalu konsisten dinilai maksimal yaitu 120 persen bahkan sejak dari triwulan pertama. Namun hal ini tidak dapat tercapai dikomponen realisasi laporan pengamatan. Sampai dengan triwulan III, capaian laporan pengamatan baru mencapai angka realisasi sebesar 1,1 dari target 4, atau 28 persen. Hal ini mengakibatkan capaian IKU gabungan sampai dengan triwulan III hanya mencapai 74%. Hal-hal yang menyebabkan adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya kegiatan kedinasan lain yang menyita waktu dan prioritas seksi pengawasan;
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap format dan SOP pengamatan;
- 3) Tidak terdapatnya PIC utama atas kegiatan pengamatan, karena IKU ini tidak diturunkan ke seksi pengawasan

Di triwulan IV, realisasi kegiatan pengamatan dapat dilakukan secara maksimal yaitu sebanyak 7 laporan pengamatan dari target 4 laporan, atau realisasi sebesar 193%. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala capaian kegiatan pengamatan tersebut adalah:

- 1) Melakukan koordinasi antar seksi pengawasan untuk membagi target pencapaian kegiatan pengamatan;
- 2) Melakukan bimtek atau IHT mengenai kegiatan pengamatan;
- 3) Menentukan PIC utama kegiatan pengamatan;
- 4) Monitoring berkala atas capaian laporan pengamatan termasuk konfirmasi realisasi ke pengampu IKU yaitu Kanwil DJP Jawa Timur II.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan menuntut banyaknya kegiatan lapangan. Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya:

- 1) Penggabungan beberapa kegiatan lapangan kedalam satu Surat Tugas Penugasan;
- 2) Sebagian kegiatan pengamatan dilakukan melalui media internet terutama jejaring sosial;
- 3) Penggabungan penugasan beberapa pegawai ke dalam satu Surat Tugas.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program penunjang pencapaian IKU yaitu :

- 1) Bimtek atau IHT tentang kegiatan pengamatan dan kegiatan pengumpulan data lapangan;
  - 2) Review manual IKU;
  - 3) Dialog Kinerja Organisasi;
  - 4) Rapat lain dalam rangka pembahasan pencapaian IKU.
- f. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko kegiatan pengamatan menunjukkan kurangnya pelaksanaan IHT atau Bimbingan Teknis terkait prosedur dan tata cara pengamatan. Hal ini akan dituangkan dalam rencana aksi di tahun 2025. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU adalah terutama menyangkut kegiatan pengamatan yaitu sebagai berikut:
- 1) Banyaknya kegiatan kedinasan lain yang menyita waktu dan prioritas seksi pengawasan;
  - 2) Kurangnya pemahaman terhadap format dan SOP pengamatan;
  - 3) Tidak terdapatnya PIC utama atas kegiatan pengamatan, karena IKU ini tidak diturunkan ke seksi pengawasan.
- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah:
- 1) Melakukan koordinasi antar seksi pengawasan untuk membagi target pencapaian kegiatan pengamatan;
  - 2) Melakukan bimbingan teknis atau IHT mengenai kegiatan pengamatan;
  - 3) Menentukan PIC utama kegiatan pengamatan
- g. Rencana Aksi di tahun 2025
- 1) Mempelajari manual IKU tahun 2025 terutama apabila ada perubahan dalam deskripsi dan formula penghitungan IKU;
  - 2) Membuat rencana pencapaian target tahun 2025 yang meliputi pembagian target ke masing masing seksi terkait dan penetapan jangka waktu pencapaian untuk mencapai hasil IKU maksimal;
  - 3) Monitoring berkala setiap bulan atas capaian hasil IKU.
  - 4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis atau IHT atas prosedur pengamatan

## 16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (8b-CP)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sem 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	6,23%	28,98%	28,98%	55,13%	55,13%	55,13%	57,58%
Capaian	120%	115,78%	115,78%	120%	120%	100,24%	100,24%

### 1) Definisi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

### 2) Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

### 3) Formula IKU

**Penghitungan IKU** ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

#### Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah

No	Jenis Pemda	Data Utama Regional						Data Regional Lainnya						Bobot Data Utama (70%)	Bobot Data Regional Lainnya (30%)	Realisasi IKU 2024
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 40% x [(4) + (3)]	(7) = 60% x [(5) + (4)]	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = 40% x [(10) + (9)]	(13) = 60% x [(11) + (10)]	(14) = (12) + (13)	(15) = 70% x (8)	(16) = 30% x (14)	(17) = (15) + (16)
1	Pemprov A	4	2	1	20.00%	30.00%	50.00%	14	8	2	22.88%	15.00%	37.88%	35.00%	11.38%	46.38%
2	Pemkab 1	5	3	2	24.00%	40.00%	64.00%	1	1	1	40.00%	60.00%	100.00%	44.80%	30.00%	74.80%
3	Pemkab 2	5	2	1	16.00%	30.00%	46.00%	1	1	0	40.00%	0.00%	40.00%	32.20%	12.00%	44.20%

**17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (9a-N)**

**18. Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N)**

**19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (9c-N)**

**20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP)**

- I. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	120%	100,24%

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan IKU yang baru tersedia di tahun 2023, sehingga data untuk tahun sebelumnya tidak tersedia. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sebesar 19,76%.

- b. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam mencapai target penghimpunan data, KPP Pratama Gresik melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dan Pemerintah Kabupaten Gresik. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu langkah utama adalah dengan memanfaatkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati sebelumnya antara DJP dan Pemerintah Kabupaten Gresik, guna memperlancar proses penghimpunan data regional dari ILAP.

Melalui upaya koordinasi yang terjalin dengan baik, diharapkan KPP Pratama Gresik dapat mengoptimalkan pencapaian penghimpunan data regional dari ILAP, yang pada akhirnya mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan yang lebih baik dan lebih efisien.

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan teknologi berbasis digital di ILAP memungkinkan otomatisasi proses pengumpulan dan analisis data, sehingga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan meminimalkan kesalahan manusia. Selain itu, pelatihan teknis bagi staf memastikan mereka dapat menggunakan sistem ILAP secara efektif, meningkatkan produktivitas kerja.

Namun, analisis menunjukkan bahwa tantangan seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur teknologi yang tidak merata dapat memengaruhi efisiensi. Oleh karena itu, alokasi sumber daya yang tepat dan penyusunan strategi mitigasi risiko menjadi prioritas untuk memastikan proses penghimpunan data berjalan lancar.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang dirancang untuk menunjang penghimpunan data regional melalui ILAP berperan penting dalam pencapaian pernyataan kinerja. Keberhasilan dapat tercapai melalui implementasi program seperti peningkatan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan intensif bagi petugas terkait pengoperasian sistem ILAP, serta optimalisasi koordinasi antarunit kerja dalam pengumpulan data.

Sebaliknya, kegagalan sering disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemeliharaan infrastruktur teknologi, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan kurangnya integrasi sistem yang mengakibatkan duplikasi atau inkonsistensi data. Hambatan ini dapat memperlambat proses penghimpunan data dan memengaruhi akurasi serta ketepatan waktu laporan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko, seperti gangguan sistem, kesalahan pengumpulan data, atau keterlambatan pelaporan, diatasi dengan memperkenalkan langkah-langkah preventif, seperti pemeliharaan sistem berkala dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi secara rutin juga berfungsi untuk mendeteksi dan mengatasi potensi masalah sejak dini.

Namun, analisis menunjukkan bahwa tantangan masih ada, terutama terkait dengan kendala teknis dan sumber daya yang terbatas. Jika mitigasi risiko tidak dilaksanakan

dengan tepat, ini dapat menghambat efisiensi penghimpunan data, yang berakibat pada rendahnya kualitas laporan regional. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan rencana aksi sangat bergantung pada keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan yang terus-menerus.

- f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Dalam konteks pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), penting untuk menganalisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang didapatkan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*.

Akses merujuk pada kemampuan seluruh kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat marginal lainnya, untuk memperoleh layanan atau informasi yang sama, tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup penyediaan aksesibilitas fisik maupun digital untuk semua pihak.

Kontrol berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan atau proses yang memengaruhi mereka. Dalam kerangka GEDSI, kontrol memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok sosial lainnya memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses manajerial dan evaluasi.

Partisipasi mengukur sejauh mana kelompok yang terpinggirkan terlibat dalam kegiatan yang mendukung pencapaian IKU. Pencapaian IKU yang inklusif mendorong keterlibatan aktif dari semua lapisan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan kepentingan yang lebih luas.

Manfaat dari pencapaian IKU harus dirasakan secara merata oleh semua kelompok. Penghargaan terhadap GEDSI memastikan bahwa manfaat yang diperoleh, baik itu dalam bentuk peningkatan layanan, pendapatan, atau kesempatan, dapat dinikmati oleh semua pihak, tanpa terkecuali.

- g. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan *ekstrem* dll

Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim: IKU yang terkait dengan penerimaan pajak dan pengelolaan keuangan negara mendukung pendanaan program perubahan iklim, seperti

investasi dalam energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Dengan memaksimalkan penerimaan pajak, IKU dapat berkontribusi pada pendanaan yang dibutuhkan untuk program-program adaptasi dan mitigasi yang berkelanjutan.

Pencegahan *stunting*: Program pemerintah yang fokus pada kesehatan ibu dan anak serta gizi yang cukup mendapat dukungan melalui anggaran yang dikelola dengan baik. IKU terkait dengan pengelolaan dana publik yang efektif mendukung pencapaian tujuan ini, memastikan bahwa alokasi dana untuk program pencegahan *stunting* tercapai sesuai target.

Kesetaraan *gender*: IKU dapat mengukur sejauh mana kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender diterapkan secara efektif. Melalui pencapaian IKU yang inklusif, kebijakan yang memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan pengurangan kesenjangan gender dapat terlaksana dengan lebih baik, mendorong keadilan sosial dalam berbagai sektor.

Pengentasan kemiskinan *ekstrem*: Pencapaian IKU yang optimal berkontribusi pada penerimaan pajak yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mendanai program pengentasan kemiskinan ekstrem. Selain itu, program-program sosial yang menysasar keluarga miskin juga dapat lebih efektif dilaksanakan dengan adanya dukungan yang memadai dari alokasi anggaran yang terkelola dengan baik.

Secara keseluruhan, IKU berperan sebagai alat ukur untuk memastikan bahwa upaya pemerintah dalam isu-isu strategis nasional dapat tercapai secara efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

h. Rencana aksi ke depan

- 1) Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan sektor swasta untuk memperoleh data yang lebih terperinci dan relevan.
- 2) Mengadakan evaluasi secara periodik terhadap kualitas dan ketepatan waktu data yang dihimpun untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pengumpulan.

**17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (9a-N)**

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
-----	----	----	----	----	------------	----	---

<b>Target</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Realisasi</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>117,48</b>	<b>117,48</b>
<b>Capaian</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>117,48%</b>	<b>117,48%</b>

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2) Definisi IKU

Pada IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM terdapat 2 komponen penilaian. Antara lain yaitu :

a) Komponen 1 (Kualitas Kompetensi):

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 aspek, yaitu:

a. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

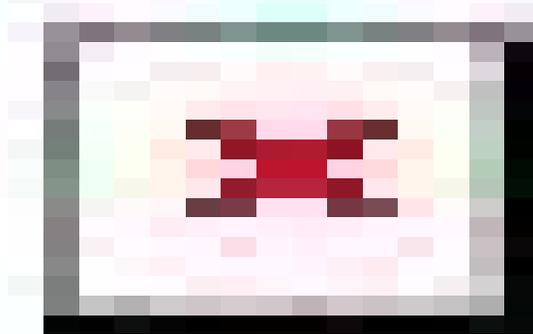
ii. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

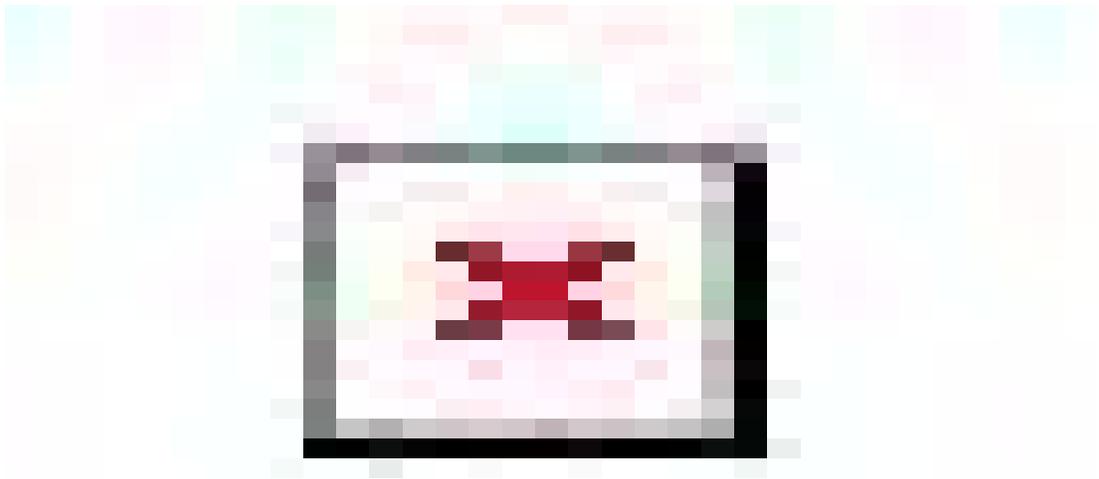
iii. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1

tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

### 3) Formula IKU







- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	100,24%

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak memiliki data historis tahun sebelumnya.

- c. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya extra effort yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan monitoring, khususnya terkait komponen 1: kualitas kompetensi pegawai, mulai dari pejabat struktural yang dipanggil untuk mengikuti assessment center hingga melakukan monitoring secara berkala atas capaian jam pelatihan standar jam pelatihan pegawai. Hal ini untuk memastikan seluruh pegawai dapat mengetahui tugas terkait Tingkat pemenuhan kompetensi yang masih harus dilakukan. Monitoring juga bisa dalam bentuk membuat Nota Dinas secara khusus yang isinya terkait tugas

- pegawai akan pemenuhan target jam pelatihan pegawai untuk diselesaikan di semester I agar dapat mencapai nilai yang maksimal.
- 2) Membuat grup WhatsApp untuk persiapan kegiatan Uji Kompetensi Teknis (UKT) baik pelaksana maupun fungsional. Hal ini dilakukan agar informasi-informasi terkait pelaksanaan UKT dapat disebarluaskan dalam satu saluran khusus, sehingga seluruh peserta UKT dapat mengakses informasi lebih mudah. Selain itu, dengan adanya grup ini, pegawai dapat saling bertukar materi dan soal untuk persiapan UKT. Sehingga diharapkan tingkat keberhasilan pegawai lulus UKT meningkat.
  - 3) Melakukan pengawasan kegiatan pembinaan mental (bintal) agar sesuai dengan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan agar kegiatan yang dilakukan tidak melenceng dari pedoman tersebut.
  - 4) Senantiasa membuat catatan pengingat bagi pegawai ataupun pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal perihal batas waktu seluruh kegiatan terkait IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Mulai dari kapan UKT mulai dilaksanakan ataupun batas waktu pelaporan kegiatan bintal. Hal ini untuk mendapatkan nilai optimal pada komponen perhitungan IKU tersebut.
- d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan penurunan kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM KPP Pratama Gresik tahun 2024 diantaranya:

- 1) Terdapat perbedaan nilai indeks penyelesaian jamlat Studia berdasarkan waktu penyelesaiannya. Apabila jamlat diselesaikan di Semester I, nilai indeks bisa mencapai 1,1. Namun jika penyelesaian dilakukan di Semester II maka indeks hanya mendapat 1. Sedangkan target untuk jamlat setiap pegawai adalah 2. Hal ini tentu menyebabkan nilai indeks tidak dapat maksimal jika tidak diselesaikan di Semester I;
- 2) Adanya target kelulusan UKT baik bagi pelaksana ataupun fungsional. Hal ini merupakan hal yang cukup berat mengingat untuk lulus UKT saja sudah cukup sulit khususnya bagi fungsional.

Menindaklanjuti kondisi tersebut telah dilakukan beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan monitoring penyelesaian jamlat secara intensif melalui menu dashboard aplikasi SIKKA sebelum semester I berakhir;
- 2) Melalui pelatihan persiapan UKT yang diadakan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Pegawai yang akan melaksanakan UKT dihimbau untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut agar dapat melakukan persiapan UKT secara maksimal dan diharapkan dapat lulus UKT

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Salah satu Langkah yang dilakukan adalah dengan menggabungkan antara kegiatan bintal dan juga kegiatan ICV yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mengingat kegiatan bintal dapat diakui sebagai kegiatan ICV ataupun sebaliknya, oleh karena itu sebisa mungkin kegiatan bintal harus memenuhi kriteria kegiatan ICV. Sehingga kedua kegiatan 1 dapat dilaksanakan bersamaan dan mampu menghemat anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tersebut.

Salah satu upaya lainnya ialah dengan menjadikan salah satu pegawai sebagai narasumber kegiatan bintal. Dengan memperhatikan kompetensi tertentu, pegawai boleh menjadi narasumber atas kegiatan bintal yang dilakukan. Hal ini mampu berperan dalam efisiensi akan biaya yang diperlukan untuk mendatangkan narasumber dari pihak eksternal.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU "Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM", ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, yang pertama adalah melakukan monitoring secara berkala dan senantiasa mengingatkan pegawai untuk menyelesaikan e-learning pada aplikasi Studia, khususnya pada semester I tahun berjalan. Hal ini berdampak pada indeks nilai penyelesaian Jamlat Pegawai yang diperoleh pegawai menjadi maksimal.

Selanjutnya adalah memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Dengan membuat jadwal pelaksanaan terkait pelaksanaan bintal, UKT dan Assesment Center, segala bentuk kegiatan dapat terpantau dan dilaksanakan dengan baik. Termasuk dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat

disampaikan secara tepat waktu, khususnya pada kegiatan bintal yang menilai waktu pelaporan sebagai komponen penilaian.

- g. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pada tahun 2024 KPP Pratama Gresik tidak melaksanakan mitigasi risiko secara khusus melalui manajemen risiko. Hal ini diakrenakan atas komponen-komponen yang dinilai dalam IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun-tahun sebelumnya sudah tercapai secara maksimal. Contohnya pada penyelesaian jamlat dan pelaksanaan UKT pelaksana yang pada tahun 2023 juga telah berhasil mencapai angka 100%.

Namun meski tidak dituangkan secara khusus pada pembuatan dokumen Manajemen Risiko KPP Pratama Gresik 2024, segala upaya telah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai maksimal pada IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM.

- h. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Berdasarkan pelaksanaan selama tahun 2024 untuk mencapai target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Masih ada pegawai yang tidak segera menyelesaikan e-learning pada Studia;
- 2) Kegiatan Bintal yang dilaksanakan cukup banyak setiap triwulannya, sedangkan kegiatan lain baik dari IHT AR, ICV juga cukup banyak;
- 3) Kurangnya persiapan pegawai dalam menghadapi UKT di saat pegawai masih harus-harus melakukan pekerjaan rutin terkait tusi setiap harinya.

a. Atas kendala tersebut, maka dilakukan upaya konkret sebagai berikut:

- 4) Membuat Nota Dinas yang menyebutkan nama pegawai yang belum memenuhi penyelesaian jamlat pada Studia untuk menarik atensi dari pegawai yang bersangkutan sehingga dapat segera menyelesaikan e-learning wajib pada Studia;
- 5) Pembuatan jadwal kegiatan bintal yang akan dilaksanakan di awal triwulan dan mengupayakan kegiatan bintal dapat dijalankan bersamaan dengan kegiatan lain. Sebab jika terlalu banyak kegiatan non tusi yang harus dilakukan, juga akan menghambat kinerja pegawai; dan

6) Pembuatan grup WhatsApp khusus pegawai yang akan melaksanakan UKT. Serta memberikan waktu bagi pegawai untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan secara daring yang biasa dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II ataupun Kantor Pusat DJP.

i. Rencana aksi tahun selanjutnya

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM telah mencapai realisasi yang cukup memuaskan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan capaian tersebut di tahun yang akan datang. Adapun upaya lebih lanjut yang kami canangkan untuk dilaksanakan ke depan untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan pemantauan dan mengingatkan secara berkala untuk menyelesaikan sesegera mungkin menyelesaikan e-learning pada Studia.
- 2) Penerbitan Nota Dinas secara berkala yang menginformasikan capaian jam pelatihan seluruh pegawai sebagai upaya monitoring lebih lanjut.
- 3) Pembuatan saluran atau grup pada media WhatsApp khusus bagi pegawai yang akan melaksanakan UKT. Hal ini dihaapkan dapat membantu pegawai saling bertukar informasi ataupun materi untuk pegawai yang nantinya dilakukan.
- 4) Pembuatan jadwal secara tahunan akan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental agar pelaksanaan dapat dilakukan lebih terjadwal dan teratur. Hal ini bertujuan mengurangi risiko adanya keterlambatan pelaksanaan ataupun pelaporan kegiatan bintal.
- 5) Kegiatan Bintal untuk dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan ICV lainnya. Hal ini agar kegiatan lebih efektif dan efisien.

## 18. Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
<b>Target</b>	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00
<b>Realisasi</b>	-	-	-	100,00	100,00	96,28	96,28
<b>Capaian</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>117,65%</b>	<b>117,65%</b>	<b>113,27%</b>	<b>113,27%</b>

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif merupakan upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

## 2) Definisi IKU

Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan Indikator Kinerja Utama yang mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

### a) Pelayanan Perpajakan

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

### b) Pengawasan Kepatuhan

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.

### c) Pemeriksaan Pajak

Indeks Pemeriksa Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.

### d) Penagihan Pajak

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Terdapat Faktor Koreksi berupa angka indeks sebesar maksimal 17 (tujuh belas), dengan rincian sebagai berikut:

### a) Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak, dengan indeks pengurang sebesar 5 (lima);

### b) Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud, dengan indeks pengurang sebesar 6 (enam);

- c) Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit, dengan indeks pengurang sebesar 3 (tiga); dan
- d) Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh Aparat Penegak Hukum (APM), dengan indeks pengurang sebesar 3 (tiga).

Survei dilaksanakan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

### 3) Formula IKU

$$((25\% \times \text{Indeks Pelayanan Perpajakan}) + (25\% \times \text{Indeks Pengawasan Kepatuhan}) + (25\% \times \text{Indeks Pemeriksaan Pajak}) + (25\% \times \text{Indeks Penagihan Pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

### 4) Realisasi IKU

Realisasi Indikator Kinerja Utama atas Indeks Penilaian Integritas Unit, terdiri atas 2 (dua) periode pelaporan, antara lain:

#### a) Triwulan III (Q3)

Realisasi periode Triwulan III merupakan realisasi terkait Penyampaian Longlist Responden yang disampaikan tepat waktu kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Nomor ND-2849/PJ.11/2024 hal Permintaan *Longlist* Calon Responden Survei Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 tanggal 25 September 2024. Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 100%, sehingga Capaian Indeks Penilaian Integritas Unit pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 117,65%.

#### b) Triwulan IV (Q4) atau Tahunan

Realisasi periode Triwulan IV atau Tahunan merupakan realisasi atas hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden. Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Tahun

2024 adalah sebesar 96,28%, sehingga Capaian Indeks Penilaian Integritas Unit pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Tahun 2024 adalah sebesar 113,27%.

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun Y-4	Realisasi Tahun Y-3	Realisasi Tahun Y-2	Realisasi Tahun Y-1	Realisasi Tahun Y
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	120%	111,14%	112,48%	113,27%

Hasil pengukuran atas target dan realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), menunjukkan bahwa capaian Indeks Penilaian Integritas Unit mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 2022, 2023, dan 2024. Capaian yang meningkat pada Tahun 2024 didorong oleh adanya langkah-langkah maupun strategi yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit dan mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan penilaian Indeks Penilaian Integritas Unit, antara lain:

- 1) Membangun komitmen seluruh pegawai yang menjunjung tinggi integritas;
- 2) Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh pegawai untuk menggalakkan upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas pegawai;
- 3) Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada para pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama yang baik dalam rangka menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- 4) Menyediakan saluran pengaduan yang memadai untuk memberikan keyakinan kepada pengguna layanan/pihak eksternal bahwa unit kerja berkomitmen untuk

- menyediakan layanan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berorientasi pada kepuasan para pemangku kepentingan;
- 5) Melaksanakan Program Internalisasi Corporate Value, dalam rangka mewujudkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga selaras dengan Program Pembangunan dan/atau Keberlanjutan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - 6) Memberikan longlist Responden dengan identitas yang lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur secara tepat waktu; dan
  - 7) Mengingatkan para pemangku kepentingan yang menjadi responden untuk mengisi survei yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara objektif dengan menjawab pertanyaan secara jujur dan terbuka.
- c. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang mendukung pencapaian Indeks Penilaian Integritas Unit, adalah sebagai berikut:
- 1) Membangun komitmen seluruh pegawai yang menjunjung tinggi integritas;
  - 2) Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh pegawai untuk menggalakkan upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas pegawai;
  - 3) Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada para pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama yang baik dalam rangka menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  - 4) Menyediakan saluran pengaduan yang memadai untuk memberikan keyakinan kepada pengguna layanan/pihak eksternal bahwa unit kerja berkomitmen untuk menyediakan layanan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berorientasi pada kepuasan para pemangku kepentingan;
  - 5) Melaksanakan Program *Internalisasi Corporate Value*, dalam rangka mewujudkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga selaras dengan Program Pembangunan dan/atau Keberlanjutan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 6) Memberikan *longlist* Responden dengan identitas yang lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur secara tepat waktu; dan
- 7) Mengingatkan para pemangku kepentingan yang menjadi responden untuk mengisi survei yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara objektif dengan menjawab pertanyaan secara jujur dan terbuka.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Unit, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

1) Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Capaian keberhasilan Indeks Penilaian Integritas Unit secara umum didorong oleh terjalannya komitmen yang baik antara unit kerja dan para pemangku kepentingan dalam menjaga dan menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai kejujuran. Selain itu, melalui program Pembangunan dan/atau Keberlanjutan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilaksanakan oleh unit kerja, menciptakan komitmen unit kerja untuk terus BERSINAR (Bekerja dengan Sinergi, Integritas, Akuntabel, dan Responsif) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2) Pendorong Penurunan Kinerja

Meskipun target Indeks Penilaian Integritas Unit berhasil terlampaui, namun terdapat kendala yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian Integritas Unit Tahun 2024, yaitu kendala yang dialami oleh Responden yang tidak memperoleh tautan survei Penilaian Integritas Unit. Namun demikian, unit kerja telah melakukan upaya penanganan sebagai solusi atas kendala tersebut dengan mengirimkan informasi data terbaru *email* Responden kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Selanjutnya, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dapat mengirim kembali tautan survei kepada

Responden melalui *email* yang telah diperbarui, sehingga Responden dapat melakukan pengisian Survei Penilaian Integritas Unit secara objektif dengan menjawab pertanyaan secara jujur dan terbuka.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sumber daya aparatur yang dilakukan dengan penguatan budaya organisasi melalui pelaksanaan Program Internalisasi *Corporate Value*, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga selaras dengan Program Pembangunan dan/atau Keberlanjutan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik; dan
- 2) Pengelolaan anggaran yang optimal dalam rangka melaksanakan program Internalisasi *Corporate Value* dan Pembangunan dan/atau Keberlanjutan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta budaya organisasi yang kuat, mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Program Internalisasi *Corporate Value*; dan
- 2) Program Pembangunan dan/atau Keberlanjutan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

g. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan memastikan pencapaian target Indeks Penilaian Integritas Unit (IPI Unit), pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya menjadi elemen krusial. Analisis terhadap implementasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana rencana tersebut efektif dalam mendukung integritas organisasi, serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaannya.

Berdasarkan evaluasi, sebagian besar rencana aksi yang disusun telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan indikator yang telah ditetapkan. Contohnya, kegiatan peningkatan kesadaran integritas melalui pelatihan internal dan sosialisasi nilai-nilai organisasi berhasil meningkatkan pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip integritas, yang tercermin dalam survei internal. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya tercapai, terutama yang memerlukan koordinasi lintas unit atau alokasi sumber daya tambahan.

Beberapa risiko utama yang telah diidentifikasi pada periode sebelumnya, seperti potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan, berhasil dimitigasi melalui penerapan prosedur yang lebih transparan dan pengawasan yang lebih ketat. Namun, masih terdapat risiko residual yang perlu diperhatikan, seperti kurang optimalnya pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat unit.

h. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

1) Kendala yang Dihadapi

Berdasarkan evaluasi, terdapat beberapa kendala utama yang memengaruhi pencapaian kinerja terhadap IPI Unit, yaitu:

a) Keterbatasan Pemahaman dan Kesadaran Pegawai

Tidak semua pegawai memiliki pemahaman mendalam mengenai pentingnya integritas sebagai salah satu elemen strategis kinerja organisasi. Hal ini menyebabkan kurangnya keterlibatan aktif dalam program-program integritas.

b) Resistensi terhadap Perubahan

Sebagian pegawai atau unit menunjukkan resistensi terhadap implementasi kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan integritas, baik karena kebiasaan kerja lama maupun kekhawatiran terhadap transparansi yang lebih ketat.

c) Keterbatasan Teknologi dan Sistem Pemantauan

Infrastruktur teknologi yang ada belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara efektif, sehingga pengumpulan data untuk penilaian integritas sering kali memerlukan waktu yang lama dan kurang akurat.

d) Koordinasi Antarunit yang Kurang Optimal

Kegiatan yang memerlukan kolaborasi lintas unit sering kali terhambat oleh komunikasi yang kurang efektif dan perbedaan prioritas antarunit.

2) Langkah-Langkah yang Diambil untuk Mengatasi Kendala

Beragam langkah telah diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain:

a) Peningkatan Edukasi dan Pelatihan

Dilakukan pelatihan dan sosialisasi intensif mengenai nilai-nilai integritas, pentingnya transparansi, dan akuntabilitas dalam kinerja organisasi. Kampanye internal juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai.

b) Pendekatan Inklusif terhadap Perubahan

Diterapkan pendekatan komunikasi yang inklusif, seperti forum diskusi terbuka dan dialog langsung dengan pegawai, untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Hal ini membantu menciptakan rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap kebijakan baru.

c) Penguatan Teknologi dan Sistem Pemantauan

Langkah strategis diambil untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi pendukung, seperti sistem pemantauan berbasis digital yang memudahkan pengumpulan data dan memfasilitasi pengawasan kinerja secara real-time.

d) Peningkatan Koordinasi Antarunit

Diperkuat mekanisme koordinasi melalui pembentukan tim kerja lintas unit, dengan tugas spesifik untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program yang bersifat kolaboratif. Jadwal pertemuan rutin dan laporan kemajuan periodik diterapkan untuk memantau perkembangan secara berkelanjutan.

i. Rencana aksi tahun selanjutnya

- 1) Membangun komitmen seluruh pegawai yang menjunjung tinggi integritas;
- 2) Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh pegawai untuk menggalakkan upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas pegawai;
- 3) Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada para pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama yang baik dalam rangka menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- 4) Menyediakan saluran pengaduan yang memadai untuk memberikan keyakinan kepada pengguna layanan/pihak eksternal bahwa unit kerja berkomitmen untuk menyediakan layanan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berorientasi pada kepuasan para pemangku kepentingan;
- 5) Melaksanakan Program Internalisasi *Corporate Value*, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga selaras dengan Program Pembangunan dan/atau Keberlanjutan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 6) Memberikan longlist Responden dengan identitas yang lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur secara tepat waktu; dan
- 7) Mengingatkan para pemangku kepentingan yang menjadi responden untuk mengisi survei yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara objektif dengan menjawab pertanyaan secara jujur dan terbuka.

## 19. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

### (9c-N)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Realisasi</b>	<b>16.28</b>	<b>50.60</b>	<b>50.60</b>	<b>83.37</b>	<b>83.37</b>	<b>99.21</b>	<b>99.21</b>
<b>Capaian</b>	<b>70.78%</b>	<b>107.66%</b>	<b>107.66%</b>	<b>119.10%</b>	<b>119.10%</b>	<b>110.23%</b>	<b>110.23%</b>

- 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian

Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

## 2) Definisi IKU

### a) Implementasi Manajemen

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- i. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- ii. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- iii. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- iv. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- i. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- ii. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

- iii. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

### 3) Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41,50	+	48,6
	=	90,10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	100,11%		

#### b. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya extra effort yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan pengumpulan data khususnya pada Triwulan I dan Triwulan II, dikarenakan saat itu data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) masih dibuat secara manual. Pengumpulan data dilakukan untuk kemudian dilakukan penghitungan dan review sebelum dirapatkan dan dikirimkan menjadi data NKO kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Permintaan data juga dilakukan menggunakan Nota Dinas agar lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Selalu memantau terkait jadwal pelaksanaan dan jadwal pelaporan setiap kegiatan baik terkait Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Mulai dari kapan batas waktu pembuatan struktur UPR, pelaksanaan DKO/DKRO, pembuatan dokumen MR, dll. Mengingat IKU ini cukup banyak komponen yang dinilai berdasarkan ketepatan waktu, oleh karena perlunya perhatian lebih akan setiap batas waktu pelaksanaan dan pelaporan

- c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan penurunan kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM KPP Pratama Gresik tahun 2024 diantaranya:

- 1) Saat pengumpulan data dari seksi-seksi terkait, masih terdapat yang masih belum mengerti ataupun kurang tepat dalam memberikan data yang dimaksud. Sehingga data yang diperoleh terkadang masih salah dan perlu diminta Kembali ke seksi terkait;
- 2) Pelaksanaan permohonan data melalui Nota Dinas merupakan suatu bentuk permohonan yang resmi, akan tetapi pada praktik di lapangan sering kali Nota Dinas tidak efektif dalam memberikan informasi terlepas dari sifat formalnya. Hal ini membuat permohonan data tidak bisa segera dilaksanakan dengan segera.

Menindaklanjuti kondisi tersebut telah dilakukan beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan rapat ataupun forum terkait penjabaran Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh seksi terkait pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko di lingkungan KPP Pratama Gresik;
- 2) Melalui pembuatan grup WhatsApp pengelola kinerja di lingkungan KPP Pratama Gresik. Grup ini khusus untuk memberikan informasi terkait manajemen kinerja, dalam hal ini DKO atau DKRO, dan manajemen risiko. Sehingga setelah ND dibuat, kita bisa melakukan follow up kepada PIC untuk memastikan informasi telah diterima dan dapat segera dilaksanakan

- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Salah satu Langkah yang dilakukan adalah dengan mengaplikasikan *paperless* pada setiap pelaksanaan DKO atau DKRO. Saat ini pelaksanaan rapat DKO dimulai dari pengumpulan data melalui *sharepoint* kemenkeu, kemudian penyajian data saat rapat sudah tidak menggunakan kertas. Hal ini bertujuan agar lebih efisien, tanpa harus menggunakan kertas sekali pakai, untuk data yang telah dikumpulkan juga bisa dilihat melalui dokumen *sharepoint* tersebut.

Salah satu upaya lainnya ialah dengan melaksanakan budaya kinerja yang dipaparkan oleh Kepala Kantor dan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal bersamaan dengan kegiatan lainnya. Dengan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, otomatis secara penggunaan sumber daya diharapkan menjadi lebih efisien.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah melakukan diskusi khusus antar pelaksana selaku PIC kompilator data dari tiap seksi/subbagian terkait. Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko di KPP Pratama Gresik, khususnya yang berkaitan dengan pengumpulan data DKO/DKRO atau penyusunan dokumen manajemen risiko. Dengan seluruh PIC memahami tugas masing-masing, data yang dikumpulkan bisa lebih valid dan dapat segera dikumpulkan.

Selanjutnya adalah pelaksanaan penyampaian budaya kinerja dilaksanakan sebisa mungkin maksimal di bulan kedua setiap triwulan. Batas waktu pelaporan penyampaian budaya kinerja adalah di tanggal 15 bulan ketiga pada setiap triwulan. Oleh karena itu dengan melaksanakan penyampaian budaya kinerja sesegera mungkin, sehingga laporan pelaksanaan kegiatan bisa segera dikumpulkan. Hal ini memberikan waktu apabila ternyata terdapat kesalahan pada laporan kegiatan yang sudah dibuat, sehingga masih bisa dibuat revisi atas laporan kegiatan tersebut.

- f. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pada tahun 2024 KPP Pratama Gresik tidak melaksanakan mitigasi risiko secara khusus melalui manajemen risiko. Hal ini diakrenakan atas komponen-komponen yang dinilai dalam IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun-tahun sebelumnya sudah tercapai secara maksimal. Contohnya pada unsur pelaporan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaksanaan Mitigasi Risiko yang pada tahun sebelumnya dapat direalisasikan secara maksimal.

Namun meski tidak dituangkan secara khusus pada pembuatan dokumen Manajemen Risiko KPP Pratama Gresik 2024, segala upaya telah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai maksimal pada IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

- g. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Berdasarkan pelaksanaan selama tahun 2024 untuk mencapai target IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman pegawai terkait pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko;
- 2) Terdapat kesalahpahaman tentang tata cara pelaporan pelaksanaan Program Budaya Kinerja di Lingkungan DJP sesuai dengan ND-804/PJ.11/2024;

Atas kendala tersebut, maka dilakukan upaya konkret sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rapat yang saat itu hanya dihadiri oleh pelaksana seksi terkait dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terkait data apa yang harus dikumpulkan dan persyaratan apa yang harus dipenuhi agar data tersebut nantinya bisa digunakan. Khususnya terkait dengan manajemen risiko yang harus memperhatikan berbagai macam ketentuan sehingga dapat dinilai layak menjadi pedoman pelaksanaan manajemen risiko;
- 2) Melakukan revisi atas Laporan Kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada dengan berkoordinasi lebih lanjut ke Kanwil DJP Jawa Timur II.

- h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Adapun upaya lebih lanjut yang kami rencanakan untuk dilaksanakan ke depan guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Membuat monitoring alur kerja dan linimasa mulai dari penyusunan dokumen, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan manajemen kinerja dan manajemen risiko;

- 2) Melaksanakan IHT kepada seluruh pegawai khususnya terkait manajemen risiko, agar pembuatan dokumen manajemen risiko bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Melakukan pengarsipan dokumen mulai dari ND permohonan data dan ND balasan dari seksi terkait hingga ND pelaporan ke unit vertikal yang lebih tinggi. Hal ini untuk menjaga arsip dokumen tetap rapi, dan untuk menyiapkan apabila ada penilaian AKIP atas pelaksanaan kinerja di lingkungan KPP Pratama Gresik.

## 20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	100	100	100	100	100	100	100
<b>Realisasi</b>	78,95	104,59	104,59	120	120	99,84	99,84
<b>Capaian</b>	78,95%	104.59%	104,59%	120.%	120.%	120.%	120.%

### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

### 2) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

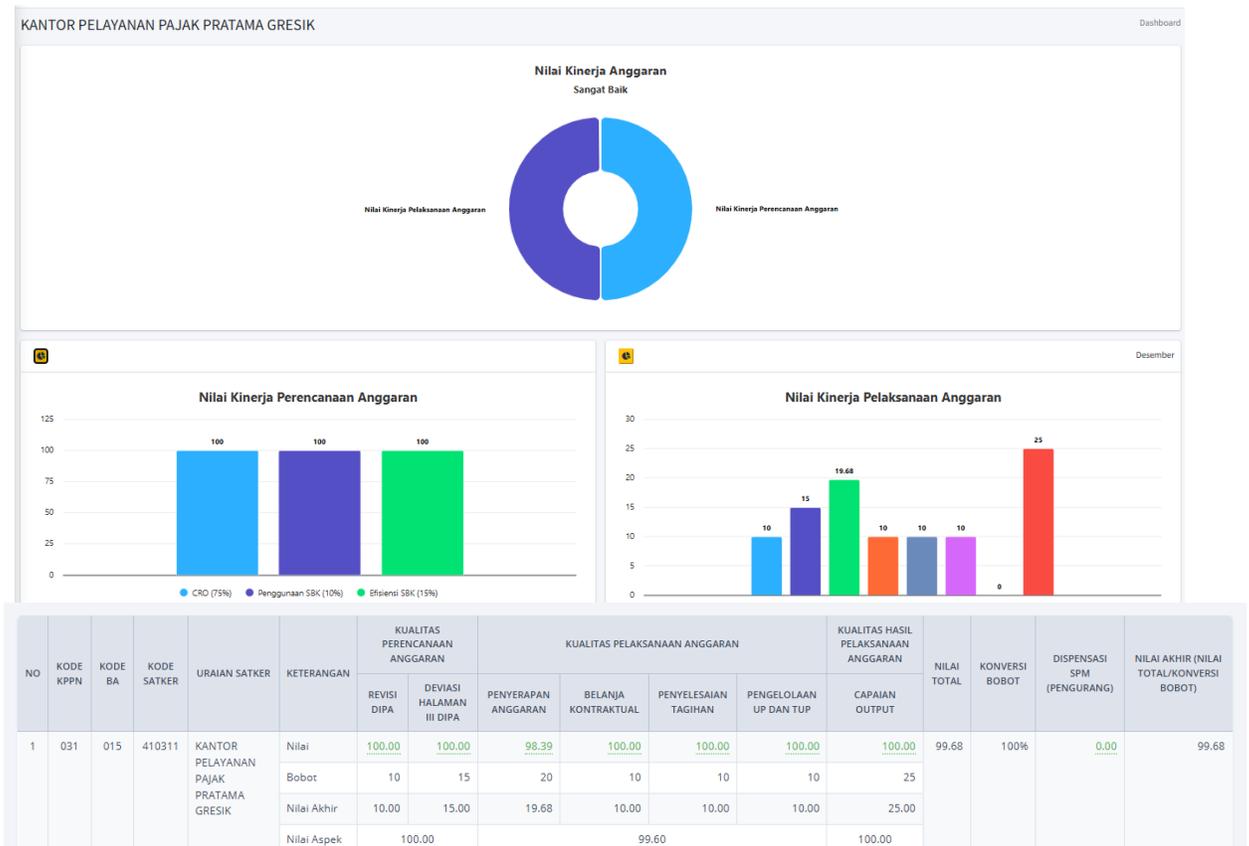
- a) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian *Output* yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

### 3) Formula IKU

\* Koefisien 0,2 =  $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$   
 $= (95-91) / (120-100)$

\*\* Koefisien 0,55 =  $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$   
 $= (91-80) / (100-80)$



- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	97,65%	92,48%	98,97%	99,84%

Realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dikatakan cukup fluktuatif dari tahun 2021 s.d. 2024. Pada tahun 2021, realisasinya sebesar 97,65 dengan capaian 102,25%. Lalu, di tahun 2022 realisasinya turun menjadi 92,48% dengan capaian 96,84%. Kemudian, di tahun 2023 meningkat menjadi 98,97% dengan capaian 98,97%. Di tahun 2024, realisasi kembali meningkat menjadi 99,84% dengan capaian sebesar 120%.

- c. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
- 1) Melakukan diskusi dan Konsultasi secara intensif dengan Kanwil DJP Jawa Timur II terkait pelaksanaan anggaran Satker.
  - 2) Melaksanakan Pekerjaan Overtime dalam upaya penyelesaian pekerjaan Jatuh Tempo.
  - 3) Secara Aktif meningkatkan kapasitas SDM Tim Pengelola Keuangan lewat diskusi bersama dan Pembaruan Petunjuk Teknis terkini terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan Anggaran
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120 dari target sebesar 100. Target kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat tercapai karena pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan anggaran yang baik dan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien serta adanya evaluasi secara rutin atas pelaksanaan kebijakan yang sudah disepakati bersama.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi adalah:

- 1) Melakukan simulasi perhitungan capaian IKU Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan mengupayakan optimalisasi capaian IKPA untuk meningkatkan nilai IKU.
- 2) Secara rutin melakukan kegiatan rapat anggaran triwulanan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal. Selain itu telah dilaksanakan diskusi terkait pengadaan secara insidental untuk belanja crash program yang bersifat urgent dan mendesak.
- 3) Melakukan kegiatan revisi anggaran dengan mempertimbangkan Optimalisasi capaian IKU, Pemenuhan Kebutuhan Belanja dan Efisiensi Anggaran.
- 4) Secara Aktif meningkatkan kapasitas SDM Tim Pengelola Keuangan lewat diskusi bersama dan Pembaruan Petunjuk Teknis terkini terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan Anggaran.
- 5) Melakukan Kegiatan Belanja sesuai dengan Kebutuhan dan Optimalisasi Capaian NKO TA 2024.
- 6) Melakukan diskusi dan Konsultasi secara intensif dengan Kanwil DJP Jawa Timur II terkait pelaksanaan anggaran Satker.
- 7) Melaksanakan pekerjaan *overtime* dalam upaya penyelesaian pekerjaan Jatuh Tempo.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan faktor kunci dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya dalam Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Analisis terhadap efisiensi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana alokasi dan pemanfaatan anggaran mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam analisis ini meliputi ketepatan perencanaan anggaran, efektivitas realisasi belanja, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntabilitas keuangan. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang

tersedia, instansi dapat meningkatkan kualitas output yang dihasilkan tanpa pemborosan anggaran.

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat ditingkatkan melalui strategi seperti penguatan mekanisme perencanaan berbasis kinerja, penggunaan teknologi dalam monitoring anggaran, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas belanja. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya mendukung pencapaian IKU, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

- f. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi langkah-langkah yang telah dirancang guna mengatasi berbagai risiko yang dapat menghambat realisasi anggaran secara optimal.

Beberapa faktor yang dianalisis meliputi kesesuaian rencana aksi dengan kondisi aktual, ketepatan respons terhadap risiko, serta efektivitas koordinasi antarunit dalam pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dan memastikan bahwa strategi mitigasi telah berjalan sesuai dengan perencanaan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, mencegah pemborosan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, efektivitas manajemen risiko menjadi faktor kunci dalam memastikan pencapaian target kinerja yang optimal.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

Penerapan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan alokasi anggaran bersifat inklusif serta memberikan manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

Analisis ini mencakup aspek akses, yaitu keterjangkauan sumber daya dan layanan bagi kelompok rentan; kontrol, yakni sejauh mana kelompok tersebut memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan anggaran; partisipasi, yaitu keterlibatan aktif dalam

perencanaan dan evaluasi kebijakan anggaran; serta manfaat, yang mengukur dampak positif dari implementasi anggaran terhadap kelompok sasaran.

Dengan memastikan bahwa anggaran dirancang dan dilaksanakan secara inklusif, instansi dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran, mempersempit kesenjangan sosial, serta mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penerapan GEDSI dalam pengelolaan anggaran bukan hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan *ekstrem*

Analisis ini mencakup sejauh mana perencanaan dan realisasi anggaran mendukung implementasi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kelompok sasaran. Misalnya, dalam mitigasi perubahan iklim, anggaran diarahkan pada program ramah lingkungan dan energi berkelanjutan. Untuk pencegahan *stunting*, pendanaan difokuskan pada intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak. Sementara itu, kesetaraan *gender* dan pengentasan kemiskinan ekstrem diperkuat melalui alokasi anggaran yang inklusif dan berbasis keadilan sosial.

Dengan memastikan bahwa alokasi anggaran mendukung pencapaian target-target strategis pemerintah, IKU tidak hanya mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

- i. Rencana aksi ke depan
  - 1) Melaksanakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa secara detail dan berbatas waktu agar dapat dijadikan bahan perencanaan anggaran yang baik dan terkontrol.
  - 2) Implementasi kegiatan pelaksanaan anggaran oleh seluruh PIC dengan baik dan sinergis dalam upaya mendukung pelaksanaan program Satker.
  - 3) Meningkatkan Kapasitas SDM dalam bidang Keuangan dan Pengadaan.
  - 4) Intensifikasi Penerapan Manajemen Risiko di bidang Keuangan dan Pengadaan dengan cara Menyusun kesepakatan bersama terkait proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dapat dipahami oleh seluruh Pegawai.

- 5) Melaksanakan rapat bersama terkait penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2024.
- 6) Amplifikasi penggunaan TOR/RAB dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin/Insidentil yang memerlukan pihak eksternal (baik sebagai Instansi Pemerintah/User Layanan).

## B. REALISASI ANGGARAN

### LAMPIRAN I

Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak  
 Nomor : ND-239/PJ.01/2025  
 Tanggal : 16 Januari 2025

### REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA TAHUN 2024

Berdasarkan PMK 62 Tahun 2023 Target Penyerapan Anggaran pada Belanja Pegawai sebesar 95%, Belanja Barang sebesar 90%, dan Belanja Modal sebesar 90%

Kode Kanwil	Kode Satker	Nama Satker	Pegawai	Barang	Blokir	Modal	Total Penyerapan	Rank
			%	%	%	%	%	
210	655519	Kanwil DJP Jawa Timur II	100,00%	99,29%	0,60%	100,00%	100,00%	1
240	663644	KPP Pratama Pangkalan Bun	99,99%	99,50%	0,41%	0,00%	99,97%	2
210	449828	KPP Madya Sidoarjo	99,11%	99,80%	0,15%	99,99%	99,83%	3
210	410311	KPP Pratama Gresik	99,55%	99,42%	0,35%	92,45%	99,64%	4
210	119592	KPP Pratama Madiun	99,26%	99,21%	0,39%	100,00%	99,63%	5
060	525296	KPP Pratama Lubuk Linggau	97,17%	99,65%	0,20%	99,92%	99,61%	6
210	409634	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	98,70%	99,32%	0,23%	100,00%	99,57%	7
210	119588	KPP Pratama Bojonegoro	98,84%	99,18%	0,08%	99,94%	99,23%	8
210	673254	KPP Pratama Jombang	98,92%	99,04%	0,26%	96,82%	99,22%	9
220	410512	KPP Pratama Banyuwangi	99,28%	98,30%	0,78%	0,00%	99,20%	10

### LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output;  
 Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
 Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
 Satuan Kerja : 410311 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024			SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode %	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>6,102,913,000</b>	<b>0</b>	<b>5,656,940,295</b>	<b>423,901,192</b>	<b>6,080,841,487 99,64 %</b>	<b>22,071,513</b>
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,098,308,000	0	1,047,879,700	44,388,700	1,092,268,400 99,45 %	6,039,600
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	309,949,000	0	295,852,753	13,812,800	309,665,553 99,91 %	283,447
<b>BMA Data dan Informasi Publik</b>	<b>309,949,000</b>	<b>0</b>	<b>295,852,753</b>	<b>13,812,800</b>	<b>309,665,553 99,91 %</b>	<b>283,447</b>
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	427,286,000	0	400,471,013	21,864,900	422,335,913 98,84 %	4,950,087
<b>BMB Komunikasi Publik</b>	<b>427,286,000</b>	<b>0</b>	<b>400,471,013</b>	<b>21,864,900</b>	<b>422,335,913 98,84 %</b>	<b>4,950,087</b>
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	361,073,000	0	351,555,934	8,711,000	360,266,934 99,78 %	806,066
<b>BCE Penanganan Perkara</b>	<b>186,323,000</b>	<b>0</b>	<b>178,766,708</b>	<b>7,450,000</b>	<b>186,216,708 99,94 %</b>	<b>106,292</b>
<b>BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan</b>	<b>174,750,000</b>	<b>0</b>	<b>172,789,226</b>	<b>1,261,000</b>	<b>174,050,226 99,60 %</b>	<b>699,774</b>
WA Program Dukungan Manajemen	5,004,605,000	0	4,609,060,595	379,512,492	4,988,573,087 99,68 %	16,031,913
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4,022,425,000	0	3,694,339,595	316,457,492	4,010,797,087 99,71 %	11,627,913
<b>CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>38,922,000</b>	<b>0</b>	<b>37,389,975</b>	<b>0</b>	<b>37,389,975 96,06 %</b>	<b>1,532,025</b>
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>3,893,572,000</b>	<b>0</b>	<b>3,579,799,120</b>	<b>311,876,732</b>	<b>3,891,675,852 99,95 %</b>	<b>1,896,148</b>
<b>EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>89,931,000</b>	<b>0</b>	<b>77,150,500</b>	<b>4,580,760</b>	<b>81,731,260 90,88 %</b>	<b>8,199,740</b>
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	982,180,000	0	914,721,000	63,055,000	977,776,000 99,55 %	4,404,000
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>982,180,000</b>	<b>0</b>	<b>914,721,000</b>	<b>63,055,000</b>	<b>977,776,000 99,55 %</b>	<b>4,404,000</b>

Realisasi anggaran KPP Pratama Gresik Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 6.080.841.487,00 atau sebesar 99,29%, namun jika menimbang blokir sebesar 0,35% untuk perjalanan dinas, maka Realisasi KPP Pratama Gresik Tahun Anggaran 2024 menjadi 99,64% atau sebesar Rp 6.102.189,00.

## C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam hal ini meliputi ketepatan perencanaan anggaran, efektivitas realisasi belanja, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntabilitas keuangan. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, KPP Pratama Gresik dapat meningkatkan kualitas output yang dihasilkan tanpa pemborosan anggaran.

Jumlah Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Gresik pada tahun 2024 adalah sebanyak 108 Pegawai. Berdasarkan dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2024, total beban kerja unit ada di angka 163.853,02 dengan jumlah kebutuhan pegawai 112 pegawai. Atas hal tersebut terdapat selisih 4 pegawai, dari jumlah pegawai seharusnya. Total efisiensi unit 1 ada di angka 1,03 dan efisiensi unit 2 mencapai 96,11%.

FP.4  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK  
REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI,  
TINGKAT EFISIENSI UNIT 1 DAN 2  
TAHUN 2024

No	Unit Organisasi	Beban Kerja Unit	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai	Selisih	EU.1	EU.2
1	Kepala Kantor Pelayanan - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik	2.191,03	1,00	1,00	0,00	1,48	100,00%
2	Pemeriksa Pajak Madya - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik	316,00	0,00	0,00	0,00	0,21	100,00%
3	Pemeriksa Pajak Muda - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik	5.281,83	4,00	3,00	-1,00	1,19	100,00%
4	Pemeriksa Pajak Pelaksana - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik	11.189,07	8,00	8,00	0,00	0,95	100,00%
5	Pemeriksa Pajak Pertama - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik	18,50	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%
6	Penilai Pajak Ahli Pertama - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7	Pemeriksa Pajak Pelaksana - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik	1.016,00	1,00	0,00	-1,00	0,09	100,00%
8	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik	1.974,07	1,00	0,00	-1,00	1,34	100,00%
9	Pemeriksa Pajak Penyelia - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik	2.038,17	1,00	2,00	1,00	0,09	100,00%
10	Pemeriksa Pajak Pertama - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik	3.085,75	2,00	3,00	1,00	0,70	100,00%
11	Pemeriksa Pajak Muda - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik	4.507,00	3,00	0,00	-3,00	3,05	100,00%
12	Pemeriksa Pajak Madya - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik	1.238,25	1,00	1,00	0,00	0,84	100,00%
13	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	15.464,02	11,00	11,00	0,00	0,95	96,61%
14	Seksi Penjaminan Kualitas Data	4.839,27	4,00	4,00	0,00	0,82	95,87%
15	Seksi Pelayanan	28.335,08	20,00	20,00	0,00	0,96	100,00%
16	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	17.456,97	12,00	9,00	-3,00	1,31	94,16%
17	Seksi Pengawasan I	11.164,38	7,00	8,00	1,00	0,95	100,00%
18	Seksi Pengawasan II	9.775,58	6,00	7,00	1,00	0,95	100,00%
19	Seksi Pengawasan III	11.635,30	8,00	8,00	0,00	0,99	100,00%
20	Seksi Pengawasan IV	10.353,55	7,00	8,00	1,00	0,88	100,00%
21	Seksi Pengawasan V	11.378,37	8,00	8,00	0,00	0,96	99,34%
22	Seksi Pengawasan VI	10.592,53	7,00	7,00	0,00	1,03	100,00%
	<b>Total</b>	<b>163.853,02</b>	<b>112,00</b>	<b>108,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>1,03</b>	<b>96,11%</b>

## D. KINERJA LAIN-LAIN

Pada tahun 2024 KPP Pratama Gresik berhasil merealisasikan kinerja sesuai dengan target yang diberikan. Hal ini merupakan bentuk komitmen KPP Pratama Gresik dalam mewujudkan sasaran strategis yang bertujuan menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal. KPP Pratama Gresik di tahun 2024 tidak hanya berhasil mencapai seluruh target IKU dengan memuaskan, tetapi juga berhasil meraih beberapa penghargaan atas kinerja tahun 2024 dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II antara lain:

- Satuan Kerja dengan Realisasi Penerimaan Dibanding Pronosa Terbaik Pertama;
- Satuan Kerja dengan Kolaborasi Penegakan Hukum Pembayaran Terbanyak Pertama;
- Satuan Kerja dengan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Terbaik Pertama;
- Satuan Kerja dengan Capaian Tingkat Kegiatan Penyitaan Terbanyak Kedua;
- Satuan Kerja dengan Kolaborasi Penegakan Hukum Pembayaran Terbanyak Pertama;
- Satuan Kerja dengan Pengelolaan BMN Terbaik Kedua Subkategori Penetapan Status Penggunaan BMN;
- Satuan Kerja dengan Penyelesaian Sensus BMN Terresponsif Kedua;
- Satuan Kerja dengan Pertumbuhan Penyampaian SPT Terbaik Kedua;

Selain itu, dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, KPP Pratama Gresik berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2023. Melanjutkan semangat Pembangunan tersebut, KPP Pratama Gresik berkomitmen untuk terus BERSINAR (Bekerja dengan Sinergi, Integritas, Akuntabel, dan Responsif) dan secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan Pembangunan dan/atau Keberlanjutan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam mengemban perannya, KPP Pratama Gresik terus melakukan perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan integritas. Upaya tersebut didukung berbagai inovasi yang memperhatikan efisiensi melalui transformasi organisasi, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin agile dilakukan transformasi organisasi melalui penyederhanaan birokrasi dan konsolidasi jabatan fungsional. Dalam rangka mencapai tingkat adaptabilitas yang optimal, KPP Pratama Gresik telah menerapkan sistem kerja fleksibel, baik dari sisi tempat bekerja maupun dari sisi waktu kerja.

Secara umum, KPP Pratama Gresik berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai sebesar 108,83. Capaian NKO pada tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan NKO tahun 2023 yang mencapai sebesar 111,79. Meski demikian terdapat sejumlah IKU dalam NKO tahun 2023 yang tidak mencapai target 100, berbeda dengan NKO tahun 2024 yang keseluruhan IKU-nya mencapai target di atas 100 (di atas ekspektasi). Hal tersebut menunjukkan bahwa KPP Pratama Gresik semakin berfokus pada outcomes.

Dalam rangka pertanggungjawaban dan komitmen akan akuntabilitas kinerja, KPP Pratama Gresik menyusun Laporan Kinerja KPP Pratama Gresik tahun 2024. Laporan Kinerja KPP Pratama Gresik tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas seluruh upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Gresik dalam pencapaian kinerja tahun 2024, serta informasi penetapan target yang lebih challenging dalam rencana kinerja tahun 2025. Laporan Kinerja ini juga menjadi salah satu alat untuk evaluasi terus menerus, atau menjadi landasan perbaikan implementasi strategi untuk pencapaian tujuan KPP Pratama Gresik di masa mendatang.